



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

2023

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Alamat

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. Wojo,
Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I
Yogyakarta



<https://www.pt-yogyakarta.go.id/>



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkah dan rahmatnya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2023 ini dapat kami sajikan.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 4108/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 Tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.

Laporan ini menguraikan secara deskriptif tentang pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2023 yang meliputi tugas pokok dan tugas penunjang yaitu bidang teknis yustisial, administrasi kepaniteraan, kesekretariatan, bidang pengawasan serta bidang pembangunan sarana prasarana fisik, pengembangan Teknologi Informasi dan Perbaikan Sistem dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kepercayaan publik terhadap Lembaga Peradilan terwujud. Hal tersebut selaras dengan tujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan mempercepat tercapainya Visi Mahkamah Agung RI.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disajikan dengan harapan dapat memberikan manfaat dan informasi serta sebagai bahan evaluasi yang berguna bagi seluruh badan peradilan di Indonesia khususnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mewujudkan lembaga Peradilan Yang Agung.

Yogyakarta, 29 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



84 Setyawan Hartono, S.H., M.H. h

KELUARGA BESAR PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA



SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.

KETUA



Dr. IFA SUDEWI, S.H., M.Hum.

WAKIL KETUA



ZULFAHMI ANWAR, S.H., M.H.

PANITERA



ROSYIDATUS SYARIFEINI, S.Psi.

SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KLAS I.A



TUTY BUDHI UTAMI, S.H., M.H.

KETUA



SRI HARSIWI, S.H., M.H.

WAKIL KETUA



MEILYNA DWIJANTI, S.H., M.H.

PANITERA



TASIMAN, S.H., M.H.

SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI SLEMAN KLAS I.A



WARI JUNIATI, S.H.,M.H.

KETUA



AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.

WAKIL KETUA



SUMARGI, S.H.,M.H.

PANITERA



NUR YUSUF IRAWAN, S.T., S.H

SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI BANTUL KLAS I.B



SUNOTO, S.H.,M.H.
KETUA



KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.H.um.
WAKIL KETUA



SIGIT INDRIYATNO, S.H., M.H.
PANITERA



YUYUN FITHRIYAH, SE, A.kt.
SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI WATES KLAS I.B



JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum.

KETUA



KHUSNUL KHATIMAH, S.H., M.H.

WAKIL KETUA



HERI HARJANTO, S.H.

PANITERA



WIRATNO, S.H.

SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI WONOSARI KLAS II



Y.F. TRI JOKO GANTAR PAMUNGKAS, S.H., M.H.

KETUA



ANNISA NOVIYATI, S.H., M.H.Li.

WAKIL KETUA



ANI WINDARTI, S.H., MBA.

PANITERA



NURHIDAYAT, S.H.

SEKRETARIS

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. SEJARAH PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA..... | 5 |
| C. VISI, MISI DAN TUJUAN | 6 |
| D. PROGRAM KERJA..... | 6 |
| E. RENCANA STRATEGIS | 7 |
| BAB II MANAJEMEN PERADILAN UMUM | 8 |
| A. KEADAAN PERKARA PERADILAN UMUM DI WILAYAH D.I. YOGYAKARTA | 8 |
| 1. Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta | 8 |
| 2. Keadaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama | 13 |
| 3. Keadaan Perkara Tingkat Banding | 17 |
| 4. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi | 19 |
| 5. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali | 21 |
| B. PENYELESAIAN PERKARA | 23 |
| 1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus | 23 |
| 2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu..... | 25 |
| 3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK..... | 28 |
| 4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi | 31 |
| 5. Jumlah Perkara Anak Yang Behasil Melalui Diversi | 31 |
| C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)... | 32 |
| 1. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)..... | 32 |
| 2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu | 33 |
| 3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) | 33 |
| BAB III SUMBER DAYA MANUSIA | 35 |
| A. MUTASI..... | 37 |
| B. PROMOSI | 37 |

| | |
|---|------------|
| C. PENSIUN | 38 |
| D. DIKLAT..... | 38 |
| BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA | 39 |
| A. PENGELOLAAN KEUANGAN..... | 39 |
| B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA..... | 43 |
| 1. Sarana Dan Prasarana Tanah, Gedung Dan Kendaraan | 43 |
| 2. Sarana Dan Prasarana Fasilitas Gedung | 48 |
| 3. Sarana Dan Prasarana Untuk Meningkatkan Pelayanan Peradilan..... | 52 |
| C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI..... | 57 |
| 1. Implementasi e-Court..... | 59 |
| 2. Implementasi SIPP | 61 |
| 3. Implementasi Aplikasi Pendukung..... | 63 |
| BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK | 71 |
| A. ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM | 71 |
| B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)..... | 74 |
| C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK..... | 76 |
| D. KEGIATAN PELAYANAN LAINNYA | 96 |
| BAB VI PENGAWASAN..... | 99 |
| A. INTERNAL | 99 |
| B. EVALUASI | 100 |
| BAB VII PENUTUP | 102 |
| A. KESIMPULAN | 102 |
| B. REKOMENDASI..... | 103 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu Lembaga Negara yang melaksanakan *pilot project* reformasi birokrasi sejak tahun 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyusun program dan kebijakan serta mengimplementasikan secara terus menerus pelaksanaan reformasi birokrasi secara utuh. Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035 yang merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya, termasuk Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta Pengadilan Negeri di bawahnya senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan Pengadilan Yang Agung (*Court of Excellence*).

Beberapa kebijakan yang dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan dan mewujudkan Pengadilan yang Agung (*Court of Excellent*) diantaranya adalah dikeluarkannya Maklumat Ketua Mahkamah Agung serta dilakukannya Akreditasi Penjaminan Mutu dan Lomba Inovasi Pelayanan Publik antar satuan kerja diseluruh Pengadilan di Indonesia. Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung, khususnya Badan Peradilan Umum dalam memberikan pelayanan baik kepada pencari keadilan maupun masyarakat pada umumnya.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan Nomor : 1639/DJU/SK/OT01. 1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, dengan tujuan yang sama. Berbagai regulasi juga telah dikeluarkan Mahkamah Agung Republik

Indonesia dalam mengatur secara teknis, antara lain SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan SK KMA Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya dan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui program-program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi pastinya sedikit banyak menghadapi kendala/rintangan yang harus dihadapi. Terdapat beberapa masalah yang menerpa dan mendapatkan perhatian publik yang cukup luas sejak tahun 2010 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN). Dalam upaya untuk menyelesaikan dan mencegah berbagai kejadian yang menurunkan wibawa Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya, maka Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI No. 01/MAKLUMAT/KMA/IX/2017 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Salah satu kegiatan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk melaksanakan core bisnis peradilan yaitu dengan melakukan peradilan elektronik. Peradilan elektronik adalah solusi untuk mengikuti era modernisasi. Dengan sistem persidangan secara virtual dapat meminimalisasi pertemuan fisik antara aparatur peradilan dan para pencari keadilan. Selain itu, peradilan elektronik menawarkan proses yang lebih cepat, mudah dan murah dengan waktu penyelesaian yang lebih terukur, hal ini dilakukan sesuai dengan beberapa regulasi yang telah diterbitkan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung pertama kali menghadirkan layanan peradilan elektronik pada tahun 2018 yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018. Layanan elektronik tersebut meliputi pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan pihak secara elektronik. Setahun berikutnya, Mahkamah Agung menggenapkan layanan elektronik tersebut dengan menghadirkan sistem persidangan elektronik yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019. Bahkan, dari Perma ini juga lahir layanan upaya hukum banding secara elektronik. Mahkamah Agung kembali memperkuat layanan pengadilan elektronik dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sejak Perma Nomor 1 Tahun 2019 dikeluarkan (SK KPT Nomor : W13.U/107/SK/ KPT/V/2019) dan terakhir kali diperbaharui dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor W13-U/19/SK/KPT/II/2023. Dengan dikeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022, Satgas SIPP Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara aktif mensosialisasikan serta secara rutin memonitoring implementasi pelaksanaan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tersebut, baik di tingkat banding ataupun tingkat pertama/Pengadilan Negeri dibawahnya.

Pada tahun 2023, Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai dengan pedoman telah melakukan Pengawasan Daerah pada Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang dilaksanakan pada bulan Mei dan Oktober 2023. Hal tersebut merupakan sebagian dari penerapan Kebijakan dan Regulasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI untuk dilaksanakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta Pengadilan Negeri dibawahnya yang semata-mata untuk mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan dan mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung (*Court of Excellence*).

Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara perdata, perkara pidana,

perkara pidana anak dan perkara tipikor di tingkat banding serta mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan di wilayah hukumnya, melakukan pembinaan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan peradilan di wilayah hukumnya, menyusun laporan hasil pengawasan, menyusun laporan perkara, menyusun statistik perkara serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari semua pengadilan negeri di wilayah hukumnya. Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta meliputi:

1. Pengadilan Negeri Yogyakarta Klas IA
2. Pengadilan Negeri Sleman Klas IA
3. Pengadilan Negeri Bantul Klas IB
4. Pengadilan Negeri Wates Klas IB
5. Pengadilan Negeri Wonosari Klas II

Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang merupakan kompilasi dari pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat terutama bagi stakeholder yang telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta sebagai bahan refleksi bagi kinerja seluruh komponen Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang terlibat dalam pemberian dukungan teknis dan administrasi. Selain itu Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini sebagai bekal untuk memproyeksikan perencanaan pada tahun-tahun berikutnya demi terwujudnya visi dan misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

B. Sejarah Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Sebelum Pengadilan Tinggi Yogyakarta dibentuk, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang, namun setelah terbit Undang Undang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, maka Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melepaskan diri dari wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang, yang kemudian menjadi wilayah hukum dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Satuan kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta diresmikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 7 Mei 1981 di Gedung Agung Yogyakarta dengan dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Bambang Surono, SH., dan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Suparno, BA.

Dalam melakukan operasionalnya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengalami beberapa perpindahan tempat, yang pada awal berdirinya beralamat di Jl. Trikora No. 1980 Yogyakarta pada tanggal 29 Juli 1980 dengan Ketua Pengadilan Tinggi pertama yaitu Bapak Surono S.H. kemudian pada tanggal 27 Mei 1986 kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta dipindah ke Jl. Prof. DR. Soepomo No.10 Yogyakarta.

Pada saat gempa menguncang Yogyakarta tanggal 27 Mei 2006 kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengalami kerusakan yang parah, sehingga untuk sementara kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta menumpang pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang beralamatkan di Jl. Kapas No. 10 Yogyakarta. Pada tanggal 1 Juli 2010, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menempati gedung baru yang beralamatkan di Jalan Lingkar Selatan, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

Berdasarkan Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor : 166/KEP/2017 Tentang Penamaan Jalan Arteri (*Ring Road*) Yogyakarta, alamat Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengalami perubahan menjadi Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta yang kala itu telah diresmikan oleh Gubernur D.I. Yogyakarta tanggal 10 Oktober 2017 dan telah dilaporkan kepada Ketua Mahkamah

Agung RI, Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta.

C. Visi, Misi Dan Tujuan

Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Tujuan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

1. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
2. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
3. Meningkatkan sistem pelayanan yang meliputi jenis dan bentuk yang dibutuhkan dan kepuasan pengguna terpenuhi.
4. Mengembangkan sistem *self assesment* secara periodik dan berjenjang.

D. Program Kerja

Pengadilan Tinggi Yogyakarta menetapkan program kerja yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan didukung dengan ketersediaan anggaran dalam DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Program tersebut selanjutnya dirinci dalam bentuk kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang lebih rinci pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Adapun program kerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
2. Program Dukungan Manajemen

E. Rencana Strategis

Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah membuat sasaran strategis yang menjadi prioritas rencana strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2020-2024 dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Pengadilan Tinggi Yogyakarta di atas serta untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan. Adapun sasaran strategis yang ditetapkan antara lain:

1. Peningkatan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (*Access To Justice*).
4. Peningkatan kualitas pengawasan.
5. Peningkatan pelayanan informasi publik.
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana.
8. Peningkatan kualitas perencanaan.
9. Peningkatan layanan umum dan rumah tangga.
10. Peningkatan layanan kepegawaian.
11. Peningkatan pengelolaan keuangan.
12. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi melalui pengembangan teknologi informasi.

BAB II

MANAJEMEN PERADILAN UMUM

A. Keadaan Perkara Di Peradilan Umum di Wilayah D.I. Yogyakarta

Gambaran umum penanganan perkara peradilan umum di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Keadaan perkara peradilan umum di Wilayah D.I. Yogyakarta tahun 2023

| No | Pengadilan | Sisa 2022 | Masuk 2023 | Beban Perkara | Cabut | Putus | Sisa 2023 |
|-------------|---------------|-----------|------------|---------------|-------|--------|-----------|
| 1 | PT Yogyakarta | 16 | 251 | 267 | 0 | 258 | 9 |
| 2 | PN Yogyakarta | 171 | 16.225 | 16.396 | 47 | 16.188 | 181 |
| 3 | PN Sleman | 251 | 21.402 | 21.653 | 80 | 21.264 | 309 |
| 4 | PN Wates | 29 | 10.559 | 10.588 | 0 | 10.508 | 70 |
| 5 | PN Bantul | 85 | 21.592 | 21.676 | 52 | 21.490 | 135 |
| 6 | PN Wonosari | 43 | 5.501 | 5.544 | 0 | 5.491 | 53 |
| J u m l a h | | 595 | 75.530 | 76.124 | 179 | 75.199 | 757 |

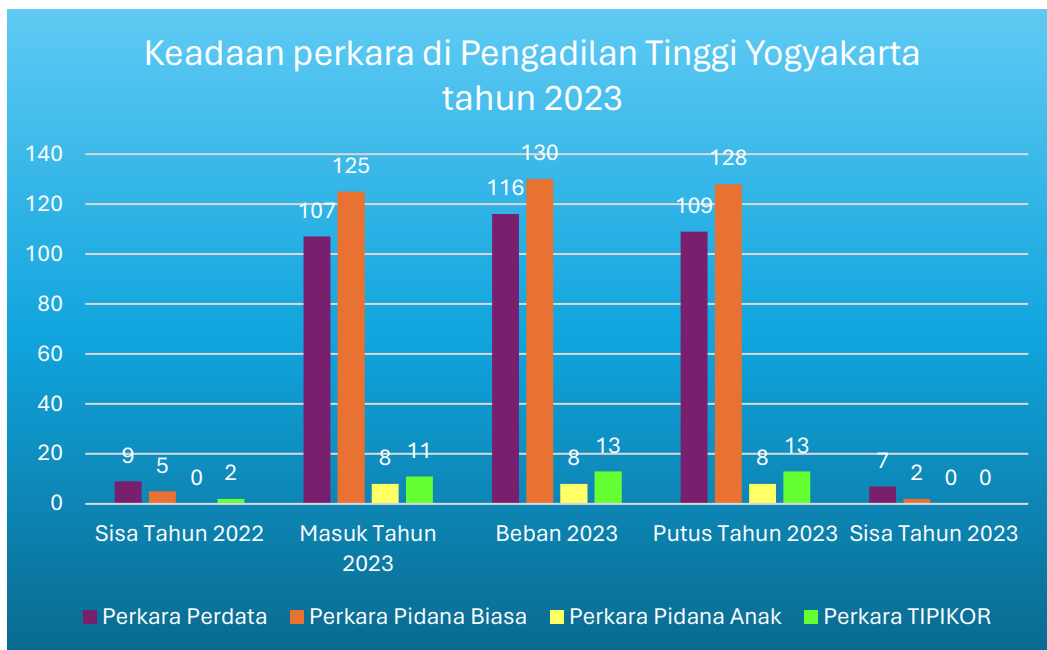
1. Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2023, yang menunjukkan kinerja penanganan perkara adalah sebagaimana tampak pada Tabel 2.2 di bawah ini. Perkara tersebut terdiri atas perkara perdata, perkara pidana, perkara pidana anak dan perkara pidana khusus Tipikor.

Tabel 2.2 : Keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2023

| No | Jenis Perkara | Sisa Tahun 2022 | Masuk Tahun 2023 | Beban 2023 | Putus Tahun 2023 | Sisa Tahun 2023 |
|-------------|----------------------|-----------------|------------------|------------|------------------|-----------------|
| 1 | Perkara Perdata | 9 | 107 | 116 | 109 | 7 |
| 2 | Perkara Pidana Biasa | 5 | 125 | 130 | 128 | 2 |
| 3 | Perkara Pidana Anak | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | Perkara TIPIKOR | 2 | 11 | 13 | 13 | 0 |
| J u m l a h | | 16 | 251 | 267 | 258 | 9 |

Grafik 2.1 : Keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2023



a. Keadaan Perkara Pidana Biasa

Keadaan Perkara Pidana Biasa di Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai berikut :

1. Sisa Tahun 2022 : 5 perkara
2. Masuk Tahun 2023 : 125 perkara
3. Putus Tahun 2023 : 128 perkara
4. Sisa akhir Tahun 2023 : 2 perkara

Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Biasa

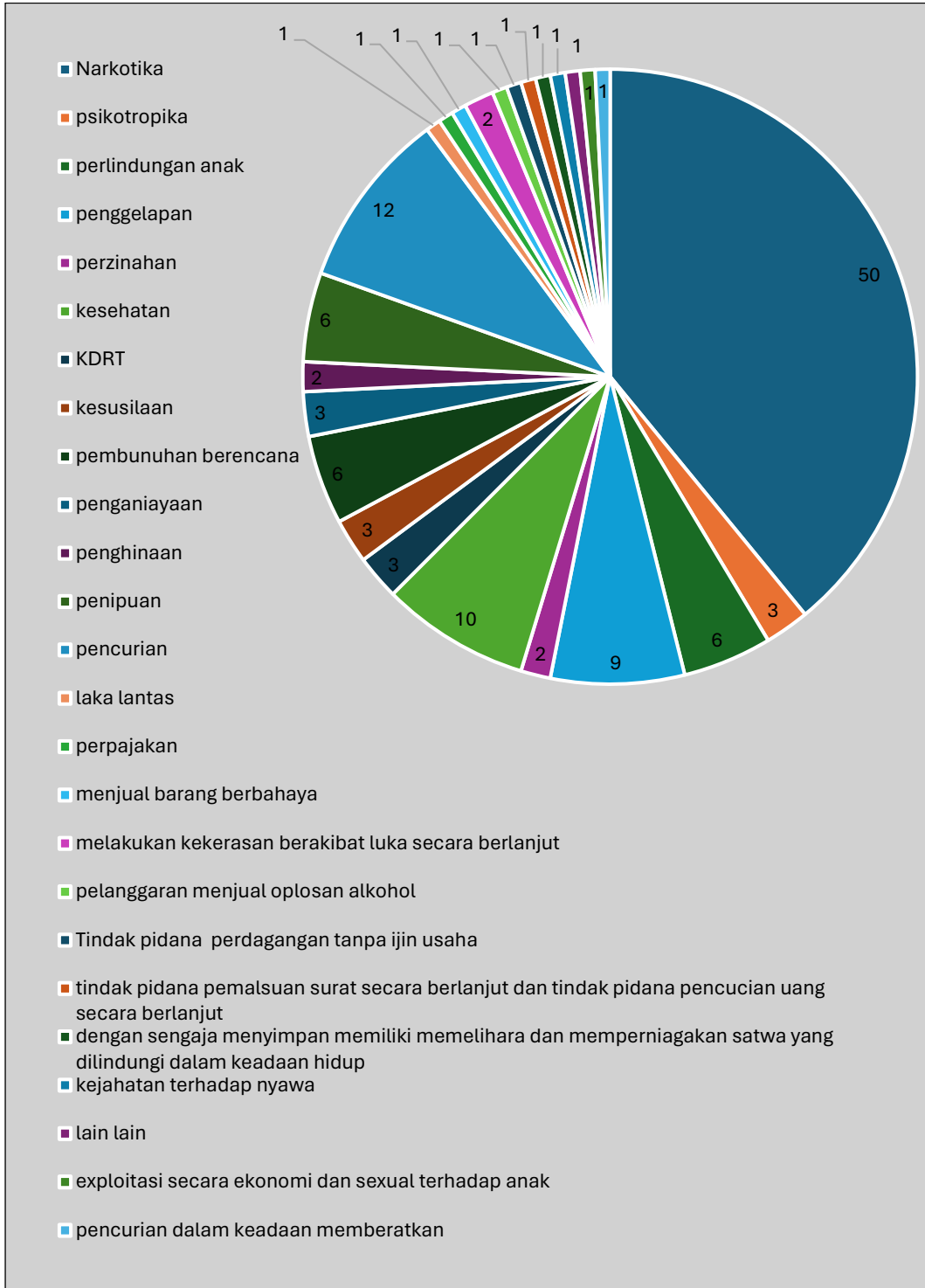
1. Putus kurang dari 1 bulan : 128 perkara
2. Putus 1 s/d 2 bulan : - perkara
3. Putus diatas 2 bulan s/d 3 bulan : - perkara

Isi amar putusan perkara pidana biasa

1. Memperbaiki : 85 perkara
2. Membatalkan : 9 perkara
3. Mengubah : 32 perkara
4. Dicarut : 2 perkara
5. Dicarut : - perkara

Keadaan Perkara Pidana Biasa berdasarkan klasifikasi perkara :

Grafik 2.2. : Klasifikasi jumlah perkara pidana biasa di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2023



b. Keadaan Perkara Pidana Anak

- 1. Sisa Tahun 2022 : - perkara
- 2. Masuk Tahun 2023 : 8 perkara
- 3. Putus Tahun 2023 : 8 perkara
- 4. Sisa akhir Tahun 2023 : - perkara

Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Anak

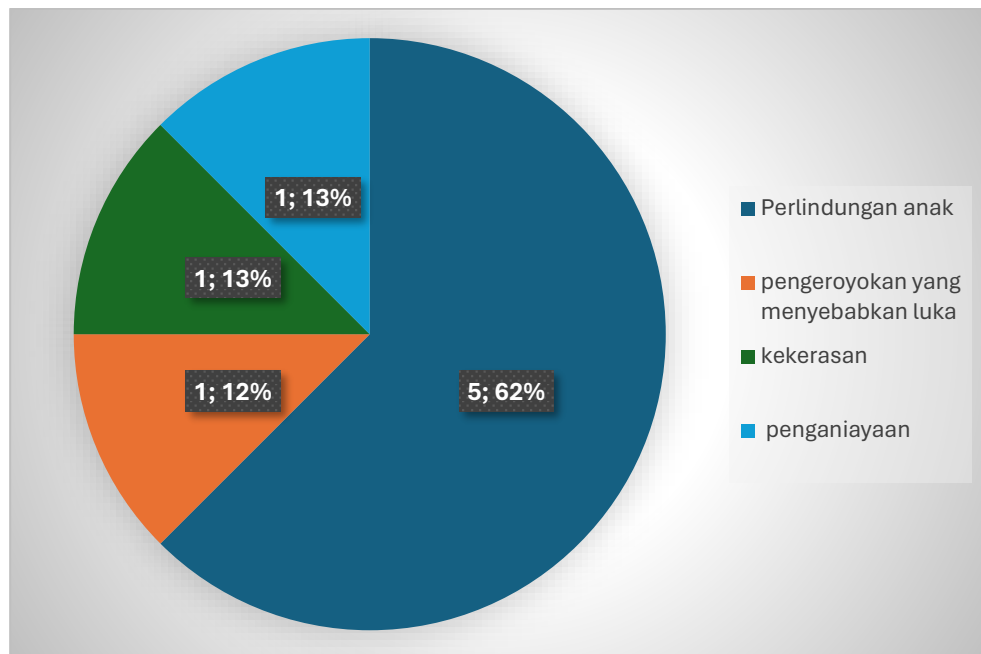
- Putus kurang dari 1 bulan : 8 perkara

Isi Amar putusan akhir Perkara Pidana Anak

- Menguatkan : 5 perkara
- Membatalkan : - perkara
- Memperbaiki : 1 perkara
- Mengubah : 2 perkara

Keadaan Perkara Pidana Anak Berdasarkan Klasifikasi Perkara :

Grafik 2.3 : Jumlah perkara pidana anak berdasarkan klasifikasi perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2023

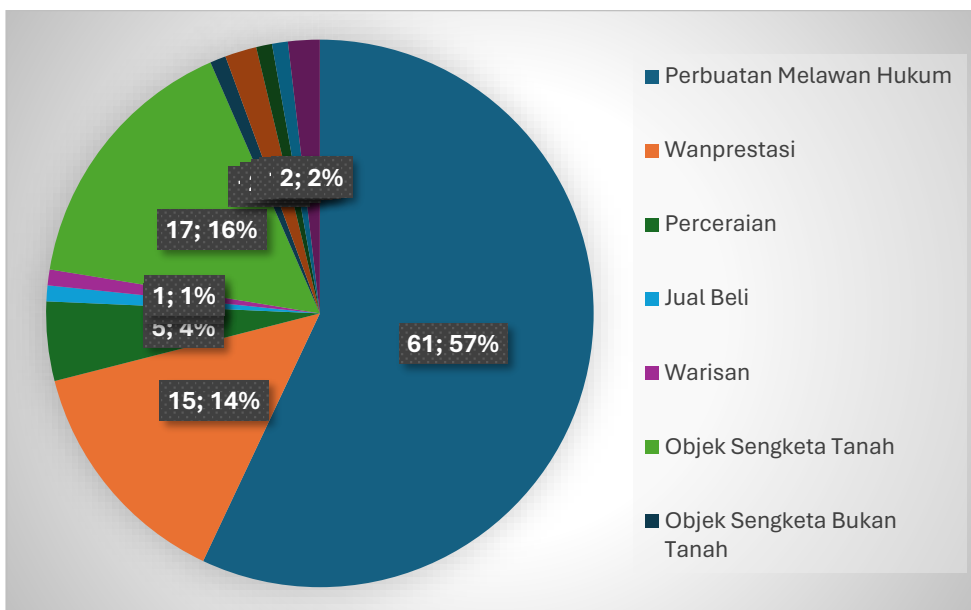


c. Keadaan Perkara Perdata

- 1. Sisa perkara tahun 2022 : 9 perkara
- 2. Perkara masuk tahun 2023 : 107 perkara
- 3. Perkara putus tahun 2023 : 109 perkara
- 4. Sisa tahun 2023 : 7 perkara

Keadaan Perkara Perdata Berdasarkan Klasifikasi Perkara :

Grafik 2.4 : Jumlah Perkara perdata berdasarkan Klasifikasi Perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2023

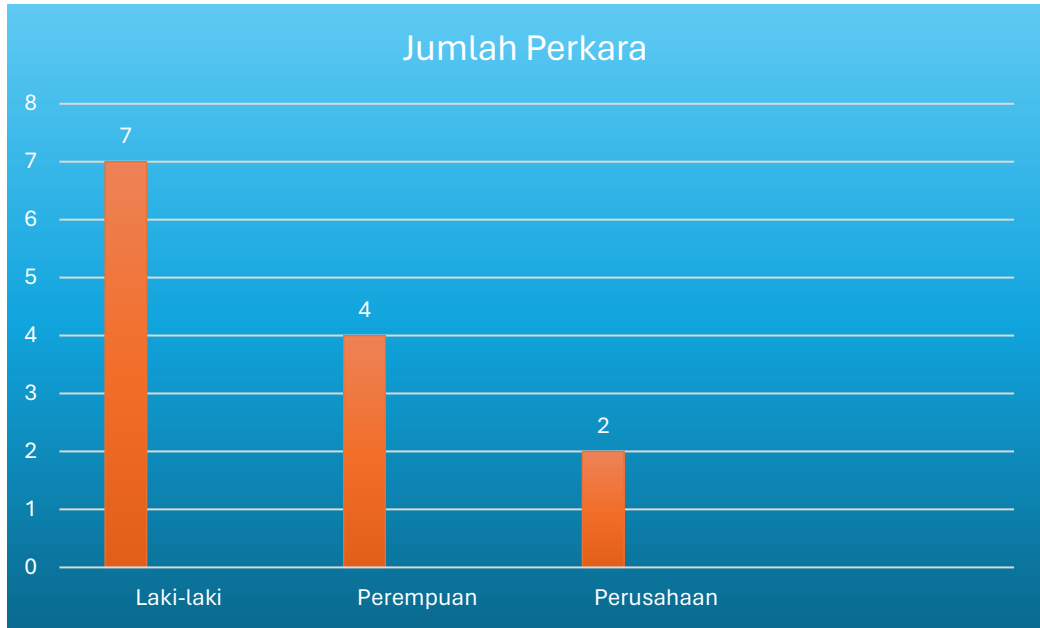


d. Keadaan Perkara TIPIKOR

- 1. Sisa Perkara Tahun 2022 : 2 Perkara
- 2. Perkara Masuk Tahun 2023 : 11 Perkara
- 3. Perkara Putus Tahun 2023 : 13 Perkara
- 4. Sisa Perkara Tahun 2023 : - Perkara

Keadaan Perkara Perdata Berdasarkan Klasifikasi Perkara :

Grafik 2.5 : Klasifikasi perkara Tipikor di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2023



2. Keadaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama

Tabel 2.3 : Keadaan perkara di Pengadilan Tingkat Pertama se D.I. Yogyakarta tahun 2023

| No | Pengadilan | Sisa 2022 | TAHUN 2023 | | | | |
|----|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | | Masuk 2023 | Beban 2023 | Cabut 2023 | Putus 2023 | Sisa 2023 |
| 1 | PN Yogyakarta | 171 | 16.225 | 16.396 | 47 | 16.188 | 181 |
| 2 | PN Sleman | 251 | 21.402 | 21.653 | 80 | 21.264 | 309 |
| 3 | PN Wates | 29 | 10.559 | 10.588 | 0 | 10.508 | 70 |
| 4 | PN Bantul | 85 | 21.592 | 21.676 | 52 | 21.490 | 135 |
| 5 | PN Wonosari | 43 | 5.501 | 5.544 | - | 5.491 | 53 |
| | JUMLAH | 579 | 75.279 | 75.857 | 179 | 74.941 | 748 |

Dari tabel diatas diketahui bahwa keseluruhan perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama di seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2023 sebanyak 75.279 perkara, kemudian sisa perkara tahun 2022 sebanyak 579 perkara, sehingga beban penanganan perkara pada tahun 2023 sebanyak 75.857 perkara.

Perkara yang diputus tahun 2023 sebanyak 74.941 perkara dan sebanyak 179 perkara dicabut oleh para pihak sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2023 sebanyak 748 perkara. Jumlah sisa perkara pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan sisa perkara pada tahun 2022 meningkat sebanyak 238 perkara. Rincian keadaan perkara tingkat pertama di lingkungan peradilan umum sebagaimana penjelasan dibawah ini :

a. Perkara Perdata

Tabel 2.4 : Keadaan Perkara Perdata Tingkat Pertama Tahun 2023

| Pengadilan/Perkara | Sisa 2022 | Masuk 2023 | Beban 2023 | Cabut 2023 | Putus 2023 | Sisa 2023 |
|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Pengadilan Negeri Yogyakarta | | | | | | |
| Perdata Gugatan | 51 | 142 | 193 | 13 | 139 | 54 |
| Perdata Permohonan | 47 | 661 | 708 | 29 | 647 | 43 |
| Gugatan Sederhana | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Perlawanan/Derden Verzet | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| PHI | 2 | 53 | 55 | 5 | 37 | 13 |
| Jumlah | 103 | 871 | 974 | 47 | 838 | 113 |
| Pengadilan Negeri Sleman | | | | | | |
| Perdata Gugatan | 96 | 288 | 384 | 18 | 252 | 114 |
| Perdata Permohonan | 29 | 1290 | 1319 | 45 | 1212 | 62 |
| Gugatan Sederhana | 0 | 28 | 28 | 17 | 8 | 3 |
| Perlawanan/Derden Verzet | 5 | 4 | 9 | 0 | 7 | 2 |
| Perdata Konsinyasi | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Jumlah | 131 | 1.612 | 1.743 | 80 | 1.480 | 183 |
| Pengadilan Negeri Wates | | | | | | |
| Perdata Gugatan | 0 | 33 | 33 | 0 | 22 | 11 |
| Perdata Permohonan | 7 | 487 | 494 | 0 | 478 | 16 |
| Gugatan Sederhana | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Perlawanan/Derden Verzet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Pengadilan/Perkara | Sisa 2022 | Masuk 2023 | Beban 2023 | Cabut 2023 | Putus 2023 | Sisa 2023 |
|-----------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Permohonan Konsinyasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eksekusi | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 17 | 533 | 550 | 0 | 513 | 27 |
| Pengadilan Negeri Bantul | | | | | | |
| Perdata Gugatan | 28 | 143 | 171 | 17 | 104 | 50 |
| Perdata Permohonan | 6 | 269 | 275 | 25 | 245 | 5 |
| Gugatan Sederhana | 1 | 32 | 32 | 8 | 21 | 4 |
| Perlawanan/Derden Verzet | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 35 | 449 | 483 | 52 | 370 | 62 |
| Pengadilan Negeri Wonosari | | | | | | |
| Perdata Permohonan | 2 | 299 | 301 | - | 281 | 20 |
| Perdata Gugatan | 6 | 32 | 38 | - | 29 | 9 |
| Gugatan Sederhana | 4 | 33 | 37 | - | 35 | 2 |
| Perlawanan / Bantahan | 0 | 3 | 3 | - | 3 | 0 |
| Jumlah | 12 | 367 | 379 | - | 348 | 31 |

b. Perkara Pidana

Tabel 2.5. : Keadaan Perkara Pidana Tingkat Pertama Tahun 2023

| Pengadilan/Perkara | Sisa 2022 | Masuk 2023 | Beban 2023 | Cabut 2023 | Putus 2023 | Sisa 2023 |
|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------|
| Pengadilan Negeri Yogyakarta | | | | | | |
| Pidana Biasa | 57 | 453 | 510 | 0 | 442 | 68 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 0 | 151 | 151 | 0 | 151 | 0 |
| Lalu lintas | 0 | 14.709 | 14.709 | 0 | 14.709 | 0 |
| Pidana Anak | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 |
| Pidana Praperadilan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tindak Pidana Korupsi | 11 | 14 | 25 | 0 | 21 | 0 |
| Jumlah | 68 | 15.354 | 15.422 | 0 | 15.350 | 68 |
| Pengadilan Negeri Sleman | | | | | | |
| Pidana Biasa | 117 | 722 | 839 | 0 | 721 | 118 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Pengadilan/Perkara | Sisa 2022 | Masuk 2023 | Beban 2023 | Cabut 2023 | Putus 2023 | Sisa 2023 |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
| Pidana Cepat | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 |
| Lalu lintas | 0 | 18.920 | 18.920 | 0 | 18.920 | 0 |
| Pidana Anak | 1 | 51 | 52 | 0 | 47 | 5 |
| Praperadilan | 2 | 13 | 15 | 0 | 12 | 3 |
| Jumlah | 120 | 19.790 | 19.910 | 0 | 19.784 | 126 |
| Pengadilan Negeri Wates | | | | | | |
| Pidana Biasa | 11 | 217 | 228 | 0 | 186 | 42 |
| Pidana Singkat | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Pidana Cepat | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 |
| Lalu lintas | 0 | 9.751 | 9.751 | 0 | 9.751 | 0 |
| Tindak Pindana Korupsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Anak | 1 | 20 | 21 | 0 | 20 | 1 |
| Pidana Praperadilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 12 | 10.026 | 10.038 | 0 | 9.995 | 43 |
| Pengadilan Negeri Bantul | | | | | | |
| Pidana Biasa | 47 | 430 | 477 | 0 | 408 | 69 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| Lalu lintas | 0 | 20.652 | 20.652 | 0 | 20.652 | 0 |
| Tindak Pidana Korupsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Anak | 3 | 36 | 39 | 0 | 35 | 4 |
| Pidana Praperadilan | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jumlah | 50 | 21.143 | 21.193 | 0 | 21.120 | 73 |
| Pengadilan Negeri Wonosari | | | | | | |
| Pidana Biasa | 30 | 141 | 171 | - | 150 | 21 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 0 | 11 | 11 | - | 11 | 0 |
| Lalu lintas | 0 | 4973 | 4973 | - | 4973 | 0 |
| Pidana Anak | 1 | 9 | 10 | - | 9 | 1 |
| Pidana Praperadilan | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Jumlah | 31 | 5.134 | 5.165 | - | 5.143 | 22 |

c. Statistik Aktivasi E-Court Pengadilan Negeri

Tabel 2.6. : Statistik Aktivasi E-Court Pengadilan Negeri se Wil D.I. Yogyakarta Tahun 2023

| Pengadilan | Jumlah Terdaftar | SKUM (Rp) | Gugatan | Permohonan | Bantahan | Gugatan Sederhana | Total |
|---------------|------------------|--------------------|------------|------------|----------|-------------------|------------|
| PN Yogyakarta | - | - | - | - | - | - | - |
| PN Sleman | - | - | - | - | - | - | - |
| PN Wates | 527 | - | 33 | 480 | - | 14 | 527 |
| PN Bantul | 434 | 106.749.000 | 129 | 232 | 4 | 31 | 396 |
| PN Wonosari | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | 961 | 106.749.000 | 162 | 712 | 4 | 45 | 923 |

3. Keadaan Perkara Tingkat Banding

a. Perkara Perdata

Tabel 2.7 : Keadaan Perkara Perdata Banding Tahun 2023

| Pengadilan/Perkara | Sisa 2022 | Masuk 2023 | Jumlah Beban 2023 | Cabut 2023 | Putus 2023 | Sisa 2023 |
|-------------------------------------|-----------|------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| Pengadilan Negeri Yogyakarta | | | | | | |
| Perdata Gugatan | 4 | 32 | 36 | 2 | 31 | 6 |
| Perdata Permohonan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perlawanan/Derden Verzet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 4 | 32 | 36 | 2 | 31 | 6 |
| Pengadilan Negeri Sleman | | | | | | |
| Perdata Gugatan | 16 | 50 | 66 | 0 | 44 | 22 |
| Perlawanan (Derden Verzet) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jumlah | 16 | 52 | 68 | 0 | 46 | 22 |
| Pengadilan Negeri Wates | | | | | | |
| Perdata Gugatan | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
| Perdata Permohonan | - | - | - | - | - | - |
| Perdata Sederhana | - | - | - | - | - | - |
| Perlawanan (Derden Verzet) | - | - | - | - | - | - |
| PHI | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
| Pengadilan Negeri Bantul | | | | | | |
| Perdata Gugatan | 3 | 14 | 17 | 0 | 15 | 2 |
| Perdata Permohonan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perlawanan/Derden Verzet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Pengadilan/Perkara | Sisa 2022 | Masuk 2023 | Jumlah Beban 2023 | Cabut 2023 | Putus 2023 | Sisa 2023 |
|-----------------------------------|-----------|------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 3 | 14 | 17 | 0 | 15 | 2 |
| Pengadilan Negeri Wonosari | | | | | | |
| Perdata Gugatan | 0 | 6 | 6 | - | 3 | 3 |
| Perlawanan (Derden Verzet) | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 2 |
| Jumlah | 0 | 8 | 8 | - | 3 | 5 |

b. Perkara Pidana

Tabel 2.8 : Keadaan Perkara Pidana Banding Tahun 2023

| Pengadilan/Perkara | Sisa 2022 | Masuk 2023 | Jumlah Beban 2023 | Cabut 2023 | Putus 2023 | Sisa 2023 |
|-------------------------------------|-----------|------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| Pengadilan Negeri Yogyakarta | | | | | | |
| Pidana Biasa | 3 | 21 | 24 | 4 | 18 | 2 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lalu Lintas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Anak | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pidana Praperadilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tindak Pidana Korupsi | 2 | 14 | 16 | 2 | 11 | 3 |
| Jumlah | 5 | 36 | 41 | 6 | 30 | 5 |
| Pengadilan Negeri Sleman | | | | | | |
| Pidana Biasa | 21 | 65 | 86 | 4 | 78 | 4 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lalu Lintas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Anak | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Jumlah | 21 | 68 | 89 | 4 | 81 | 4 |
| Pengadilan Negeri Wates | | | | | | |
| Pidana Biasa | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 |
| Pidana Singkat | - | - | - | - | - | - |
| Pidana Cepat | - | - | - | - | - | - |
| Lalu Lintas | - | - | - | - | - | - |
| Tindak Pidana Korupsi | - | - | - | - | - | - |
| Pidana Anak | - | - | - | - | - | - |
| Pidana Praperadilan | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 |
| Pengadilan Negeri Bantul | | | | | | |
| Pidana Biasa | 1 | 47 | 48 | 3 | 42 | 3 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| Pengadilan/Perkara | Sisa 2022 | Masuk 2023 | Jumlah Beban 2023 | Cabut 2023 | Putus 2023 | Sisa 2023 |
|-----------------------------------|-----------|------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| Lalu lintas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tindak Pidana Korupsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Anak | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pidana Praperadilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 50 | 51 | 3 | 45 | 3 |
| Pengadilan Negeri Wonosari | | | | | | |
| Pidana Biasa | 0 | 8 | 8 | - | 8 | 0 |
| Pidana Anak | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 0 |
| Jumlah | 0 | 10 | 10 | - | 10 | 0 |

4. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

a. Perkara Perdata

Tabel 2.9 : Keadaan Perkara Perdata Kasasi Tahun 2023

| Pengadilan/Perkara | Sisa 2022 | Masuk 2023 | Jumlah Beban 2023 | Cabut 2023 | Putus 2023 | Sisa 2023 |
|-------------------------------------|-----------|------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| Pengadilan Negeri Yogyakarta | | | | | | |
| Perdata Gugatan | 27 | 20 | 47 | 0 | 8 | 39 |
| Perdata Permohonan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perlawanan (Derden Verzet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHI | 14 | 16 | 29 | 5 | 18 | 12 |
| Jumlah | 41 | 37 | 77 | 5 | 26 | 52 |
| Pengadilan Negeri Sleman | | | | | | |
| Perdata Gugatan | 25 | 28 | 53 | 0 | 16 | 37 |
| Perlawanan (Derden Verzet) | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Perdata Permohonan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 25 | 30 | 57 | 0 | 17 | 38 |
| Pengadilan Negeri Wates | | | | | | |
| Perdata Gugatan | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
| Perdata Permohonan | - | - | - | - | - | - |
| Gugatan Sederhana | - | - | - | - | - | - |
| Perlawanan (Derden Verzet) | - | - | - | - | - | - |
| PHI | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
| Pengadilan Negeri Bantul | | | | | | |
| Perdata Gugatan | 10 | 8 | 18 | 0 | 6 | 12 |
| Perdata Permohonan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Pengadilan/Perkara | Sisa 2022 | Masuk 2023 | Jumlah Beban 2023 | Cabut 2023 | Putus 2023 | Sisa 2023 |
|-----------------------------------|-----------|------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perlawanan/Derden Verzet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 10 | 8 | 18 | 0 | 6 | 12 |
| Pengadilan Negeri Wonosari | | | | | | |
| Perdata Gugatan | 6 | 1 | 7 | - | 4 | 3 |
| Perlawanan (Derden Verzet) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Jumlah | 6 | 1 | 7 | - | 4 | 3 |

b. Perkara Pidana

Tabel 2.10 : Keadaan Perkara Pidana Kasasi Tahun 2023

| Pengadilan/Perkara | Sisa 2022 | Masuk 2023 | Jumlah Beban 2023 | Cabut 2023 | Putus 2023 | Sisa 2023 |
|-------------------------------------|-----------|------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| Pengadilan Negeri Yogyakarta | | | | | | |
| Pidana Biasa | 13 | 9 | 22 | 0 | 14 | 8 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lalu Lintas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Anak | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pidana Praperadilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tindak Pidana Korupsi | 4 | 9 | 13 | 0 | 4 | 9 |
| Jumlah | 18 | 18 | 36 | 0 | 19 | 17 |
| Pengadilan Negeri Sleman | | | | | | |
| Pidana Biasa | 23 | 41 | 64 | 3 | 16 | 45 |
| Pidana Anak | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Jumlah | 23 | 44 | 67 | 3 | 17 | 47 |
| Pengadilan Negeri Wates | | | | | | |
| Pidana Biasa | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - |
| Pidana Singkat | - | - | - | - | - | - |
| Pidana Cepat | - | - | - | - | - | - |
| Lalu Lintas | - | - | - | - | - | - |
| Tindak Pidana Korupsi | - | - | - | - | - | - |
| Pidana Anak | - | - | - | - | - | - |
| Pidana Praperadilan | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - |

| Pengadilan/Perkara | Sisa 2022 | Masuk 2023 | Jumlah Beban 2023 | Cabut 2023 | Putus 2023 | Sisa 2023 |
|-----------------------------------|-----------|------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| Pengadilan Negeri Bantul | | | | | | |
| Pidana Biasa | 5 | 22 | 27 | 0 | 17 | 10 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lalu lintas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tindak Pidana Korupsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Anak | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pidana Praperadilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 6 | 23 | 29 | 0 | 19 | 10 |
| Pengadilan Negeri Wonosari | | | | | | |
| Pidana Biasa | 3 | 2 | 5 | - | 5 | 0 |
| Pidana Anak | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 0 |
| Jumlah | 3 | 4 | 7 | - | 7 | 0 |

5. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

a. Perkara Perdata

Tabel 2.11 : Keadaan Perkara Perdata Peninjauan Kembali Tahun 2023

| Pengadilan/Perkara | Sisa 2022 | Masuk 2023 | Jumlah Beban 2023 | Cabut 2023 | Putus 2023 | Sisa 2023 |
|-------------------------------------|-----------|------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| Pengadilan Negeri Yogyakarta | | | | | | |
| Perdata Gugatan | 8 | 8 | 16 | 0 | 6 | 10 |
| Perdata Permohonan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perlawanan/Derden Verzet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | 8 | 8 | 16 | 0 | 6 | 10 |
| Pengadilan Negeri Sleman | | | | | | |
| Perdata Gugatan | 5 | 3 | 288 | 0 | 2 | 6 |
| Jumlah | 5 | 3 | 288 | 0 | 2 | 6 |
| Pengadilan Negeri Wates | | | | | | |
| Perdata Gugatan | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Perdata Permohonan | - | - | - | - | - | - |
| Gugatan Sederhana | - | - | - | - | - | - |
| Perlawanan/Derden Verzet | - | - | - | - | - | - |
| PHI | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | - | 1 | 1 | - | - | 1 |

| Pengadilan/Perkara | Sisa 2022 | Masuk 2023 | Jumlah Beban 2023 | Cabut 2023 | Putus 2023 | Sisa 2023 |
|-----------------------------------|-----------|------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| Pengadilan Negeri Bantul | | | | | | |
| Perdata Gugatan | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| Perdata Permohonan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perlawanan/Derden Verzet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| Pengadilan Negeri Wonosari | | | | | | |
| Perdata Gugatan | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 |
| Jumlah | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 |

b. Perkara Pidana

Tabel 2.12 : Keadaan Perkara Pidana Peninjauan Kembali Tahun 2023

| Pengadilan/Perkara | Sisa 2022 | Masuk 2023 | Jumlah Beban 2023 | Cabut 2023 | Putus 2023 | Sisa 2023 |
|-------------------------------------|-----------|------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| Pengadilan Negeri Yogyakarta | | | | | | |
| Pidana Biasa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lalu Lintas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Praperadilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tindak Pidana Korupsi | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Jumlah | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| Pengadilan Negeri Sleman | | | | | | |
| Pidana Biasa | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Jumlah | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Pengadilan Negeri Wates | | | | | | |
| Pidana Biasa | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Pidana Singkat | - | - | - | - | - | - |
| Pidana Cepat | - | - | - | - | - | - |
| Lalu lintas | - | - | - | - | - | - |
| Tindak Pidana Korupsi | - | - | - | - | - | - |
| Pidana Anak | - | - | - | - | - | - |
| Pidana Praperadilan | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Pengadilan Negeri Bantul | | | | | | |
| Pidana Biasa | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lalu lintas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tindak Pidana Korupsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Pengadilan/Perkara | Sisa 2022 | Masuk 2023 | Jumlah Beban 2023 | Cabut 2023 | Putus 2023 | Sisa 2023 |
|-----------------------------------|-----------|------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| Pidana Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Praperadilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 |
| Pengadilan Negeri Wonosari | | | | | | |
| Pidana Biasa | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 |
| Jumlah | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 |

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus oleh Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah jumlah sisa perkara tahun 2022 yang diputus pada tahun 2023

a. Perkara Perdata

Tabel 2.13 : Jumlah Sisa Perkara Perdata Tahun 2022 Yang Diputus Tahun 2023

| Jenis Perkara | Sisa Perkara Tahun 2022 | Sisa 2022 di Cabut 2023 | Sisa Perkara Yang Diputus 2023 | Sisa Perkara 2023 |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Pengadilan Negeri Yogyakarta | | | | |
| Perdata Gugatan | 51 | 13 | 51 | 0 |
| Perdata Permohonan | 47 | 29 | 47 | 0 |
| Perdata Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perlawanan/bantahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsinyasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eksekusi | 116 | 0 | 88 | 28 |
| PHI | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jumlah | 216 | 42 | 188 | 28 |
| Pengadilan Negeri Sleman | | | | |
| Perdata Gugatan | 96 | 5 | 91 | 0 |
| Perdata Permohonan | 29 | 1 | 28 | 0 |
| Perdata Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perlawanan/bantahan | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Konsinyasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eksekusi | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Jumlah | 131 | 7 | 123 | 1 |

| Pengadilan Negeri Wates | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Perdata Gugatan | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Perdata Permohonan | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Perdata Gugatan Sederhana | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Perlawanan/bantahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsinyasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eksekusi | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Jumlah | 25 | 0 | 15 | 10 |
| Pengadilan Negeri Bantul | | | | |
| Perdata Gugatan | 28 | 1 | 27 | 0 |
| Perdata Permohonan | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Perdata Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perlawanan/bantahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsinyasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eksekusi | 32 | 6 | 9 | 17 |
| Jumlah | 60 | 7 | 42 | 17 |
| Pengadilan Negeri Wonosari | | | | |
| Perdata Gugatan | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Perdata Permohonan | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Perdata Gugatan Sederhana | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Perlawanan/bantahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsinyasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eksekusi | 31 | 19 | 2 | 10 |
| Jumlah | 43 | 19 | 14 | 10 |

b. Perkara Pidana

Tabel 2.14 : Jumlah Sisa Perkara Pidana Tahun 2022 Yang Diputus Tahun 2023

| Jenis Perkara | Sisa Perkara Tahun 2022 | Sisa 2022 di Cabut 2023 | Sisa Perkara Yang Diputus 2023 | Sisa Perkara 2023 |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Pengadilan Negeri Yogyakarta | | | | |
| Pidana Biasa | 57 | 0 | 57 | 0 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lalu Lintas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Anak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praperadilan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipikor | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Jumlah | 68 | 0 | 68 | 0 |

| Pengadilan Negeri Sleman | | | | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------|----------|
| Pidana Biasa | 117 | 0 | 117 | 0 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lalu Lintas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Anak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Praperadilan | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jumlah | 120 | 0 | 120 | 0 |
| Pengadilan Negeri Wates | | | | |
| Pidana Biasa | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lalu Lintas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Anak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Praperadilan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Pengadilan Negeri Bantul | | | | |
| Pidana Biasa | 47 | 0 | 47 | 0 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Anak | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Lalu Lintas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praperadilan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 50 | 0 | 50 | 0 |
| Pengadilan Negeri Wonosari | | | | |
| Pidana Biasa | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Anak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lalu Lintas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praperadilan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 31 | 0 | 31 | 0 |

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Perkara Yang Diputus Tepat Waktu menurut SEMA No. 2 Tahun 2014 adalah penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Adapun jumlah perkara yang diputus tepat waktu tahun 2023 pada Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah sebagai berikut :

a. Perkara Perdata

Tabel 2.15 : Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2023

| Jenis Perkara | Perkara Yg Ditangani | | Jumlah Putusan | Putusan Tepat Waktu | Putusan terlambat |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Sisa 2022 | Masuk 2023 | | | |
| Pengadilan Negeri Yogyakarta | | | | | |
| Perdata Gugatan | 51 | 142 | 139 | 103 | 36 |
| Perdata Permohonan | 33 | 661 | 647 | 585 | 62 |
| Perdata Gugatan Sederhana | 0 | 12 | 12 | 5 | 0 |
| PHI | 2 | 53 | 42 | 30 | 12 |
| Perlawanan / Bantahan | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jumlah | 88 | 869 | 840 | 723 | 113 |
| Pengadilan Negeri Sleman | | | | | |
| Perdata Gugatan | 96 | 288 | 272 | 252 | 20 |
| Perdata Permohonan | 29 | 1290 | 1257 | 1256 | 1 |
| Perdata Gugatan Sederhana | 0 | 28 | 25 | 25 | 0 |
| Perlawanan / Bantahan | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 |
| Jumlah | 130 | 1610 | 1561 | 1540 | 21 |
| Pengadilan Negeri Wates | | | | | |
| Perdata Gugatan | 0 | 33 | 22 | 19 | 3 |
| Perdata Permohonan | 7 | 487 | 478 | 478 | 0 |
| Perdata Gugatan Sederhana | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| Perlawanan / Bantahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsinyasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eksekusi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 17 | 533 | 513 | 510 | 3 |
| Pengadilan Negeri Bantul | | | | | |
| Perdata Gugatan | 28 | 143 | 121 | 92 | 29 |
| Perdata Permohonan | 6 | 269 | 270 | 270 | 0 |
| Perdata Gugatan Sederhana | 0 | 32 | 29 | 29 | 0 |
| Perlawanan / Bantahan | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Konsinyasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eksekusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 34 | 449 | 422 | 391 | 29 |

| Pengadilan Negeri Wonosari | | | | | |
|----------------------------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| Perdata Gugatan | 6 | 32 | 29 | 29 | 0 |
| Perdata Permohonan | 2 | 299 | 281 | 281 | 0 |
| Perdata Gugatan Sederhana | 4 | 33 | 35 | 35 | 0 |
| Perlawanan / Bantahan | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Jumlah | 12 | 367 | 348 | 348 | 0 |

b. Perkara Pidana

Tabel 2.16 : Perkara Pidana Tingkat Pertama Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2023

| Jenis Perkara | Perkara Yg Ditangani | | Jumlah Putusan | Putusan Tepat Waktu | Putusan terlambat |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Sisa 2022 | Masuk 2023 | | | |
| Pengadilan Negeri Yogyakarta | | | | | |
| Pidana Biasa | 57 | 453 | 442 | 442 | 0 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Tipiring / Cepat | 0 | 151 | 151 | 151 | 0 |
| Pidana Lalu-Lintas | 0 | 14709 | 14709 | 14709 | 0 |
| Tipikor | 11 | 14 | 25 | 0 | 25 |
| Pidana Anak | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |
| Pidana Praperadilan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jumlah | 68 | 15354 | 15354 | 15329 | 25 |
| Pengadilan Negeri Sleman | | | | | |
| Pidana Biasa | 117 | 722 | 721 | 716 | 5 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Tipiring / Cepat | 0 | 84 | 84 | 84 | 0 |
| Pidana Lalu-Lintas | 0 | 18920 | 18920 | 18920 | 0 |
| Pidana Anak | 1 | 51 | 47 | 47 | 0 |
| Pidana Praperadilan | 2 | 13 | 12 | 12 | 0 |
| Jumlah | 120 | 19790 | 19784 | 19779 | 5 |
| Pengadilan Negeri Wates | | | | | |
| Pidana Biasa | 11 | 217 | 186 | 186 | 0 |
| Pidana Singkat | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| Pidana Tipiring / Cepat | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |
| Pidana Lalu-Lintas | 0 | 9751 | 9751 | 9751 | 0 |
| Pidana Anak | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Pidana Praperadilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 12 | 10026 | 9995 | 9995 | 0 |

| Pengadilan Negeri Bantul | | | | | |
|----------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Pidana Biasa | 47 | 430 | 408 | 408 | 0 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Tipiring / Cepat | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 |
| Pidana Lalu-Lintas | 0 | 20652 | 20652 | 20652 | 0 |
| Pidana Anak | 3 | 36 | 35 | 35 | 0 |
| Pidana Praperadilan | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Jumlah | 50 | 21143 | 21120 | 21120 | 0 |
| Pengadilan Negeri Wonosari | | | | | |
| Pidana Biasa | 30 | 141 | 150 | 150 | 0 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Tipiring / Cepat | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 |
| Pidana Lalu-Lintas | 0 | 4973 | 4973 | 4973 | 0 |
| Pidana Anak | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| Pidana Praperadilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 31 | 5134 | 5143 | 5143 | 0 |

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK

Akseptabilitas putusan pengadilan adalah penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap kasus hukum atau sengketa yang dihadapinya. Akseptabilitas ditunjukkan dengan tidak dilakukannya upaya hukum terhadap putusan tersebut.

a. Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Berikut adalah jumlah perkara pada Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023.

Tabel 2.17 : Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023

| Jenis Perkara | Sisa Putusan PN 2022 Belum BHT | Putusan PN 2023 Contentius | Mengajukan Banding | Tidak Mengajukan Banding |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| Pengadilan Negeri Yogyakarta | | | | |
| Perkara Perdata | 19 | 730 | 42 | 707 |
| Perkara Pidana | 2 | 443 | 21 | 424 |
| Perkara Anak | 0 | 26 | 1 | 25 |
| Perkara Tipikor | 0 | 21 | 14 | 7 |
| Jumlah | 21 | 1220 | 78 | 1163 |

| Pengadilan Negeri Sleman | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Perkara Perdata | 0 | 1559 | 51 | 1508 |
| Perkara Pidana | 0 | 19737 | 86 | 19651 |
| Perkara Anak | 0 | 47 | 3 | 44 |
| Jumlah | 0 | 21343 | 140 | 21203 |
| Pengadilan Negeri Wates | | | | |
| Perkara Perdata | 13 | 529 | 3 | 539 |
| Perkara Pidana | 3 | 9995 | 5 | 9993 |
| Perkara Anak | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Jumlah | 16 | 10544 | 8 | 10552 |
| Pengadilan Negeri Bantul | | | | |
| Perkara Perdata | 41 | 415 | 17 | 439 |
| Perkara Pidana | 55 | 21085 | 49 | 21091 |
| Perkara Anak | 0 | 35 | 2 | 33 |
| Jumlah | 96 | 21535 | 68 | 21563 |
| Pengadilan Negeri Wonosari | | | | |
| Perkara Perdata | 14 | 311 | 6 | 319 |
| Perkara Pidana | 6 | 150 | 8 | 148 |
| Perkara Anak | 0 | 9 | 2 | 7 |
| Jumlah | 20 | 470 | 16 | 474 |

b. Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Berikut adalah jumlah perkara pada Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2023.

Tabel 2.18 : Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022

| Jenis Perkara | Sisa Putusan Banding 2022 Belum BHT | Putusan Banding 2023 | Mengajukan Kasasi | Tidak Mengajukan Kasasi |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Pengadilan Negeri Yogyakarta | | | | |
| Perkara Perdata | 0 | 35 | 24 | 11 |
| Perkara PHI | 0 | 0 | 27 | 12 |
| Perkara Pidana | 1 | 19 | 14 | 6 |
| Perkara Tipikor | 0 | 14 | 9 | 5 |
| Jumlah | 1 | 68 | 74 | 34 |
| Pengadilan Negeri Sleman | | | | |
| Perkara Perdata | 11 | 53 | 29 | 35 |
| Perkara Pidana | 0 | 78 | 41 | 37 |
| Jumlah | 11 | 131 | 70 | 72 |

| Pengadilan Negeri Wates | | | | |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Perkara Perdata | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Perkara Pidana | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Jumlah | 1 | 7 | 3 | 4 |
| Pengadilan Negeri Bantul | | | | |
| Perkara Perdata | 3 | 15 | 8 | 7 |
| Perkara Pidana | 0 | 45 | 23 | 22 |
| Jumlah | 3 | 60 | 31 | 29 |
| Pengadilan Negeri Wonosari | | | | |
| Perkara Perdata | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Perkara Pidana | 2 | 10 | 4 | 18 |
| Jumlah | 5 | 13 | 5 | 23 |

c. Akseptabilitas Putusan Kasasi

Berikut adalah jumlah perkara pada Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2023

Tabel 2.19 : Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali Tahun 2023

| Jenis Perkara | Putusan PN 2023 Yang Telah BHT | Putusan Banding 2023 Telah BHT | Putusan Kasasi Tahun 2023 | Permohonan PK Tahun 2023 | Tidak Mengajukan PK |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| Pengadilan Negeri Yogyakarta | | | | | |
| Perkara Perdata | 169 | 683 | 15 | 6 | 9 |
| Perkara Pidana | 15311 | 5 | 15 | 1 | 15330 |
| Perkara Tipikor | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Jumlah | 15483 | 694 | 34 | 7 | 15339 |
| Pengadilan Negeri Sleman | | | | | |
| Perkara Perdata | 1556 | 1 | 0 | 0 | 1286 |
| Perkara Pidana | 680 | 40 | 36 | 4 | 30 |
| Jumlah | 2236 | 41 | 36 | 4 | 1316 |
| Pengadilan Negeri Wates | | | | | |
| Perkara Perdata | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Perkara Pidana | 9974 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Jumlah | 9974 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Pengadilan Negeri Bantul | | | | | |
| Perkara Perdata | 409 | 7 | 6 | 2 | 407 |
| Perkara Pidana | 21107 | 37 | 19 | 8 | 21099 |
| Jumlah | 21516 | 44 | 25 | 10 | 21506 |
| Pengadilan Negeri Wonosari | | | | | |
| Perkara Perdata | 294 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Perkara Pidana | 163 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Jumlah | 457 | 6 | 11 | 0 | 0 |

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi

Berikut adalah jumlah perkara perdata pada Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang berhasil di mediasi pada tahun 2023.

Tabel 2.20 : Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi Tahun 2023

| Pengadilan Negeri | Jumlah Perkara Mediasi | Status | | | |
|-------------------|------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------------------|
| | | Berhasil | Tidak Berhasil | Proses Mediasi | Tidak dapat dilaksanakan |
| PN Yogyakarta | 132 | 9 | 123 | 132 | 3 |
| PN Sleman | 174 | 11 | 156 | 1 | 6 |
| PN Wates | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| PN Bantul | 84 | 7 | 73 | 0 | 2 |
| PN Wonosari | 17 | 3 | 11 | 1 | 2 |
| Jumlah | 418 | 32 | 372 | 134 | 13 |

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Berikut adalah jumlah perkara anak pada Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang berhasil melalui diversi pada tahun 2023.

Tabel 2.21 : Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2023

| No | Pengadilan Negeri | Jumlah Perkara Pidana Anak | Jumlah Perkara Diversi | Status | | |
|----|------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|----------------|--------------|
| | | | | Berhasil | Tidak Berhasil | Dalam Proses |
| 1 | Pengadilan Negeri Yogyakarta | 26 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| 2 | Pengadilan Negeri Sleman | 51 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Pengadilan Negeri Wates | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pengadilan Negeri Bantul | 36 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 5 | Pengadilan Negeri Wonosari | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| | Jumlah | 139 | 28 | 18 | 9 | 1 |

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

1. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

Tabel 2.22 : Statistik Posbakum Pengadilan Negeri se Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2023

| Satuan Kerja | Organisasi Pemberi Layanan | Jumlah Layanan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Sisa Anggaran |
|---------------|--|----------------|---------------|--------------------|---------------|
| PN Yogyakarta | LBH AFTA | 936 | 48.000.000 | 47.926.400 | 73.600 |
| PN Sleman | RBH AFTA | 790 | 31.200.000 | 31.200.000 | 0 |
| PN Bantul | LBH Sejati Pusat Bantuan Hukum JANABADRA | 267 | 31.200.000 | 31.200.000 | 0 |
| PN Wates | Pusat Bantuan Hukum Nyi Ageng Serang | 128 | 31.200.000 | 31.200.000 | 0 |
| PN Wonosari | LBH Al Kautsar | 219 | 40.800.000 | 40.800.000 | 0 |
| Jumlah | | 2211 | 182.400.000 | 182.326.400 | 73.600 |

Pos Bantuan Hukum merupakan layanan yang dibentuk oleh setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa Informasi, Konsultasi, dan Advis Hukum yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Lembaga Bantuan Hukum sebelumnya telah mengadakan MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan mengirimkan dan menempatkan personilnya untuk melakukan piket pelayanan di ruang yang telah disediakan oleh Pengadilan Negeri.

Menurut SEMA Nomor: 10 Tahun 2010, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Umum diartikan sebagai ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum. Ruang Posbakum digunakan untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, serta memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara dan bantuan jasa Advokat. Posbakum diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum mereka.

- **Kegiatan yang telah dilaksanakan :**
 1. Konsultasi
 2. Pembuatan Dokumen Hukum
 3. Pendampingan persidangan
- **Kendala yang dihadapi :**
 1. Resiko Penyalahgunaan wewenang (sebagai lapak menjual jasa)
 2. Resiko terhadap penyuaipan
- **Langkah antisipasi dan penyelesaian :**
 1. Pembuatan Pakta Integritas semua petugas pos bakum
 2. Voice Warning System anti penyuaipan dan anti gratifikasi
 3. Banner / Informasi Mekanisme Pengaduan
 4. Monitoring tiap bulan oleh hakim pengawas

2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Sidang Keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan. Sidang keliling ini dimaksudkan untuk memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil yang menghadapi masalah ongkos transportasi dari dan ke pengadilan.

Pada tahun 2023 tidak ada Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang melakukan Sidang Keliling karena dipandang masih aksesibel untuk masyarakat, selain itu adanya teknologi informasi cukup membantu untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pengadilan, dan juga tidak ada Pengadilan Negeri yang mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaannya.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan secara cuma-cuma atau gratis. Pada tahun 2023, pengadilan yang mendapatkan alokasi anggaran untuk menangani perkara prodeo di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Wonosari.

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1 A pada tahun anggaran 2023 mendapat alokasi anggaran dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang tertuang dalam DIPA No.005.03.099128/2021 untuk 3 (tiga) perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) sebesar Rp. 2.010.000,-. terealisasi 7 (tujuh) perkara, hal ini telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Selain itu, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1 A juga telah melakukan sosialisasi dan *public campaign* ke masyarakat.

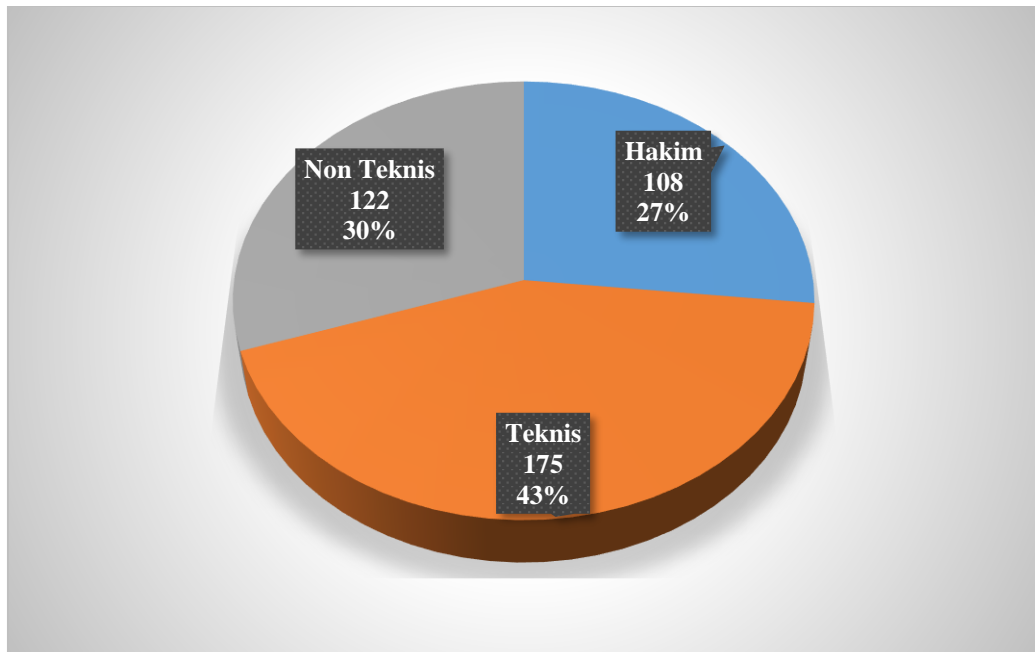
Pengadilan Negeri Wonosari mendapatkan pagu anggaran tambahan untuk Prodeo dari Dirjen Badilum pada Triwulan II. Perkara Prodeo yang masuk pada Pengadilan Negeri Wonosari pada tahun 2023 sebanyak 8 perkara dengan rincian 1 perkara Gugatan dan 7 perkara Permohonan.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur yang menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan. Dengan beban kerja yang ada dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi jumlah, pendidikan dan kompetensi. Adapun keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.1 : Rekapitulasi Jumlah Sumber Daya Manusia pada Peradilan Umum di Wilayah DI. Yogyakarta Tahun 2023



Dari grafik diatas dapat digambarkan bahwa keadaan Sumber Daya Manusia secara keseluruhan pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta secara terperinci adalah sebagai berikut:

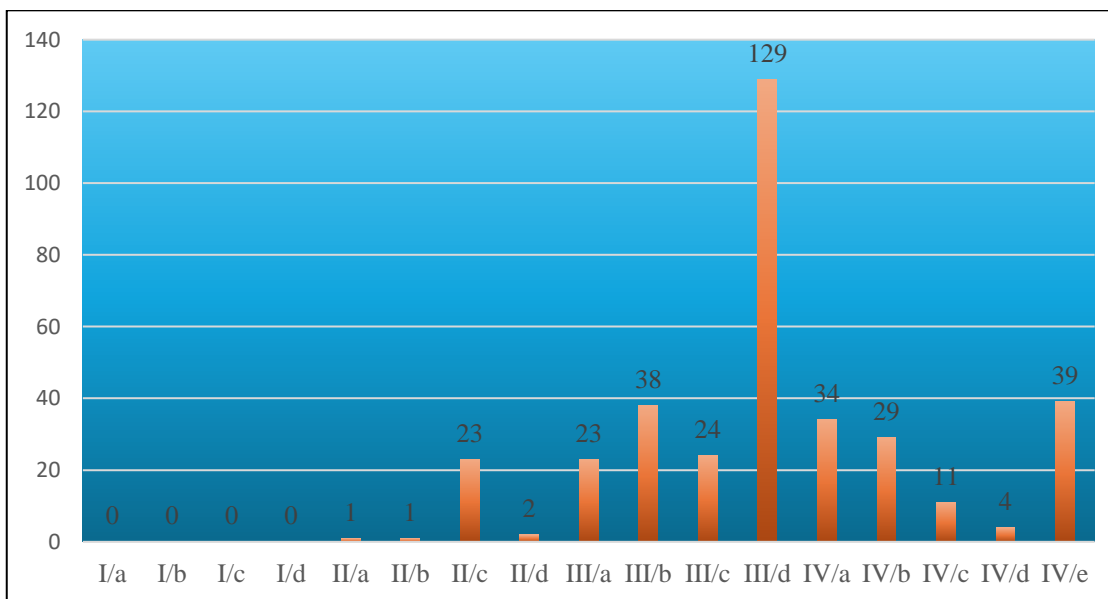
Tabel 3.1 : Rekapitulasi Jumlah Sumber Daya Manusia pada Peradilan Umum di Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2023

| No | Satuan Kerja | Tipe/ Kelas | Hakim | | | | | Teknis | | | | | Non Teknis | | | | | Jumlah | |
|--------|---------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|----------|-----------------------|------------|--------|---------------|------------|--------|-----------|
| | | | Ketua | Wakil Ketua | Hakim | Hakim Ad Hoc Tipikor | Hakim Ad Hoc PHI | Hakim Yustisial | Panitera | Panitera Muda | Panitera Pengganti | Jurusita | Jurusita Pengganti | Sekretaris | Ka Bag | Ka Sub Bag | Fungsional | | Pelaksana |
| 1 | PT Yogyakarta | B | 1 | 1 | 33 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 24 | 113 |
| 2 | PN Yogyakarta | IA | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 29 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 84 |
| 3 | PN Sleman | IA | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 72 |
| 4 | PN Bantul | IB | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 53 |
| 5 | PN Wates | IB | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 43 |
| 6 | PN Wonosari | II | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 40 |
| Jumlah | | | 5 | 5 | 83 | 5 | 2 | 8 | 5 | 19 | 99 | 25 | 27 | 5 | 2 | 19 | 19 | 77 | 405 |

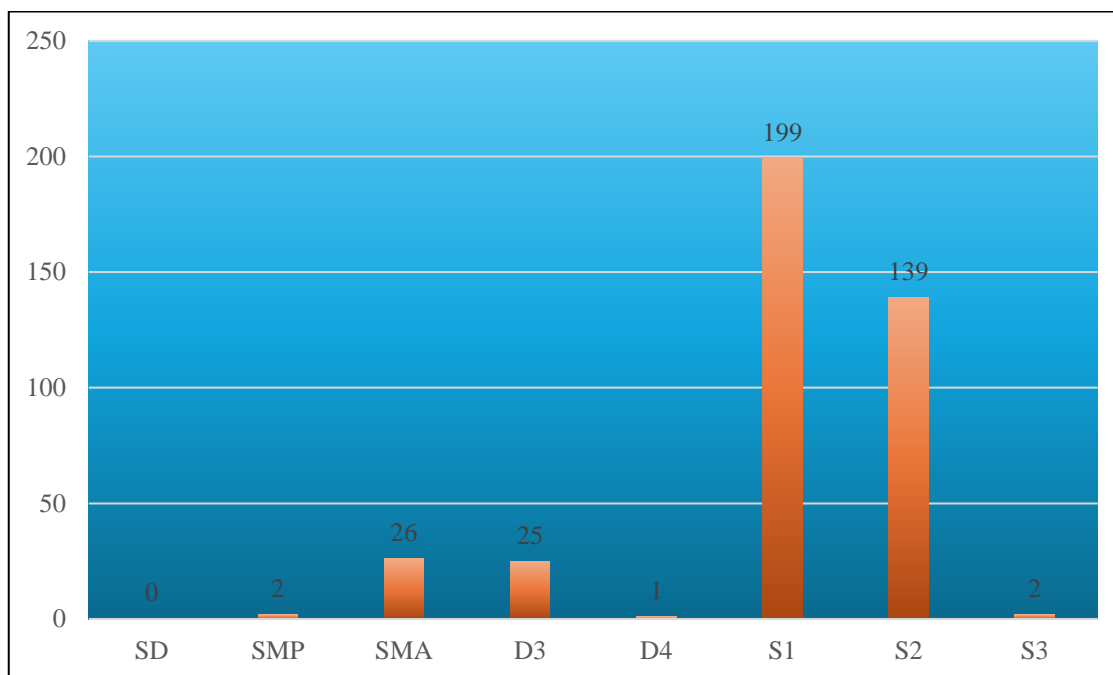
Keterangan : Untuk Jabatan Sekretaris Pengadilan Tinggi Yogyakarta kosong sejak 1 Desember 2023 dikarenakan pejabat terakhir pensiun.

Secara lebih terperinci, keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta berdasarkan Pangkat / Golongan dan Pendidikan adalah sebagai berikut :

Grafik 3.2 : Rekapitulasi Hakim dan Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan pada Peradilan Umum di Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2023



Grafik 3.3. : Rekapitulasi Jumlah Hakim dan Pegawai Berdasarkan Pendidikan pada Peradilan Umum di Wilayah D.I.Yogyakarta Tahun 2023



A. Mutasi

Rekapitulasi mutasi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Rekapitulasi Mutasi Hakim dan Pegawai Tahun 2023

| No | Satuan Kerja | Tipe/ Kelas | Mutasi Masuk | | | | Mutasi Keluar | | | |
|--------|---------------|----------------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | | Hakim | Teknis | Non Teknis | Jumlah | Hakim | Teknis | Non Teknis | Jumlah |
| 1 | PT Yogyakarta | B | 17 | 6 | 5 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | PN Yogyakarta | IA | 8 | 2 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | PN Sleman | IA | 7 | 2 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 4 | PN Bantul | IB | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 5 | PN Wates | IB | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | PN Wonosari | II | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Jumlah | | | 38 | 19 | 10 | 67 | 29 | 12 | 3 | 44 |

B. Promosi

Rekapitulasi promosi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 : Rekapitulasi Promosi Hakim dan Pegawai Tahun 2023

| No | Satuan Kerja | Tipe/ Kelas | Promosi Sebagai | | | | | | | | Jumlah | |
|--------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------|------------|--------|--------|---------------|----|--------|----|
| | | | Ketua | Wakil Ketua | Panitera | Sekretaris | Ka Bag | PanMud | Ka Sub Bag | PP | | JF |
| 1 | PT Yogyakarta | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | PN Yogyakarta | IA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | PN Sleman | IA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | PN Bantul | IB | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 5 | PN Wates | IB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | PN Wonosari | II | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Jumlah | | | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 28 |

C. Pensiun

Rekapitulasi pensiun Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 : Rekapitulasi Pensiun Hakim dan Pegawai Tahun 2023

| No | Satuan Kerja | Tipe/ Kelas | Batas Usia Pensiun | Meninggal | Pensiun Dini | Jumlah |
|--------|---------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------------|--------|
| 1 | PT Yogyakarta | B | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | PN Yogyakarta | IA | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | PN Sleman | IA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | PN Bantul | IB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PN Wates | IB | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | PN Wonosari | II | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | | | 25 | 3 | 0 | 28 |

D. Diklat

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta Tahun 2023 terdiri dari diklat yang dilaksanakan secara daring maupun secara langsung. Adapun rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 : Rekapitulasi Diklat Hakim dan Pegawai Tahun 2023

| No | Satuan Kerja | Tipe/ Kelas | Jenis Diklat | | | | | | Jumlah |
|--------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------|
| | | | Diklat PKA | Diklat PKP | Diklat Teknis | Diklat Fungsional | Diklat Pra Jabatan | Diklat Lain-Lain | |
| 1 | PT Yogyakarta | B | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 14 | 35 |
| 2 | PN Yogyakarta | IA | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 12 | 53 |
| 3 | PN Sleman | IA | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 13 |
| 4 | PN Bantul | IB | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 25 |
| 5 | PN Wates | IB | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 20 | 27 |
| 6 | PN Wonoasari | II | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| Jumlah | | | 2 | 2 | 87 | 17 | 0 | 61 | 169 |

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

A. Pengelolaan Keuangan

Anggaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2023 tertuang dalam dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 yaitu sebagai berikut:

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (01) dengan nomor SP DIPA-005.01.2.400342/2023 tanggal 30 November 2023 dengan program kerja yaitu dukungan manajemen.

Pada tahun 2023 Pengadilan Tinggi Yogyakarta mendapat alokasi anggaran sebesar Rp32.689.259.000 (tiga puluh dua milyar enam ratus delapan puluh sembilan jua dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Realisasi Anggaran DIPA BUA PT Yogyakarta
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| JENIS BELANJA | TAHUN 2023 | | | TAHUN 2022 | | | PERUBAHAN REALISASI |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| | PAGU DIPA | REALISASI | | PAGU DIPA | REALISASI | | |
| | Rp | Rp | % | Rp | Rp | % | |
| PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA | | | | | | | |
| Belanja Pegawai | 29.214.768.000 | 29.189.463.556 | 99,91 | 33.746.587.000 | 33.694.450.332 | 99,85 | 0,07 |
| Belanja Barang | 2.936.691.000 | 2.927.621.962 | 99,69 | 3.350.975.000 | 3.343.988.186 | 99,79 | (0,10) |
| Belanja Modal | 537.800.000 | 537.490.000 | 99,94 | 1.060.199.000 | 1.057.961.000 | 99,79 | 0,15 |
| Jumlah DIPA BUA | 32.689.259.000 | 32.654.575.518 | 99,89 | 38.157.761.000 | 38.096.399.518 | 99,84 | 0,05 |

Berdasarkan program tersebut, maka rincian anggaran dibedakan menjadi dua kegiatan dengan nilai pagu sebagai berikut:

- Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi yang terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang. Nilai pagu belanja pegawai tahun 2023 sebesar Rp29.214.768.000 yang dipergunakan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai dengan nilai realisasi sebesar Rp29.189.556. Sedangkan nilai pagu belanja barang untuk tahun 2023 sebesar Rp2.936.691.000 yang digunakan untuk membiayai operasional kantor dan telah terealisasi sebesar Rp2.927.621.962.
- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung yang terdiri atas belanja modal dengan nilai pagu

sebesar Rp537.800.000 yang digunakan untuk sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan kepada para *stakeholder* dengan nilai realisasi sebesar Rp537.490.000.

- DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum (03) dengan nomor SP DIPA-005.03.2.400343/2023 tanggal 30 November 2023 dengan satu program kerja yaitu Penegakan dan Pelayanan Hukum. Pada tahun 2023 Pengadilan Tinggi Yogyakarta mendapat alokasi anggaran sebesar Rp172.560.000 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk fokus pada satu kegiatan yaitu peningkatan manajemen peradilan umum dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Realisasi Anggaran DIPA Badilum PT Yogyakarta
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| JENIS BELANJA | TAHUN 2023 | | | TAHUN 2022 | | | PERUBAHAN REALISASI |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| | PAGU DIPA | REALISASI | | PAGU DIPA | REALISASI | | |
| | Rp | Rp | % | Rp | Rp | % | |
| PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA | | | | | | | |
| Belanja Barang | 172.560.000 | 170.922.775 | 99,05 | 241.605.000 | 239.436.800 | 99,10 | (0,05) |
| Jumlah DIPA Badilum | 172.560.000 | 170.922.775 | 99,05 | 241.605.000 | 239.436.800 | 99,10 | (0,05) |

Anggaran tersebut digunakan untuk pembinaan teknis dan administrasi terhadap satuan kerja dibawah Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta untuk percepatan penyelesaian perkara.

Sebagai pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki lima satker dibawahnya. Berikut merupakan rekapitulasi pengelolaan keuangan pada masing-masing satuan kerja:

1. Pengadilan Negeri Yogyakarta

| JENIS BELANJA | TAHUN 2023 | | | TAHUN 2022 | | | PERUBAHAN REALISASI |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| | PAGU DIPA | REALISASI | | PAGU DIPA | REALISASI | | |
| | Rp | Rp | % | Rp | Rp | % | |
| PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA | | | | | | | |
| Bel. Pegawai | 13.107.245.000 | 12.953.210.699 | 98,82 | 13.610.257.000 | 13.566.663.049 | 99,68 | (0,85) |
| Bel. Barang Operasional | 2.601.132.000 | 2.583.020.315 | 99,30 | 2.985.721.000 | 2.970.163.342 | 99,48 | (0,18) |
| Bel. Barang Non Operasional | 6.963.000 | 6.820.000 | 97,95 | 27.500.000 | 27.324.140 | 99,36 | (1,41) |
| Bel. Modal | 15.000.000 | 15.000.000 | 100,00 | 361.000.000 | 360.840.000 | 99,96 | 0,04 |
| Jumlah DIPA BUA | 15.780.340.000 | 15.558.051.014 | 98,90 | 16.984.478.000 | 16.924.990.531 | 99,65 | (0,75) |

| JENIS BELANJA | TAHUN 2023 | | | TAHUN 2022 | | | PERUBAHAN REALISASI |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| | PAGU DIPA | REALISASI | | PAGU DIPA | REALISASI | | |
| | Rp | Rp | % | Rp | Rp | % | |
| PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA | | | | | | | |
| Bel. Barang | 290.176.000 | 286.529.240 | 98,74 | 300.860.000 | 295.219.810 | 98,13 | 0,62 |
| Jumlah DIPA Badilum | 290.176.000 | 286.529.240 | 98,74 | 300.860.000 | 295.219.810 | 98,13 | 0,62 |

2. Pengadilan Negeri Sleman

| JENIS BELANJA | TAHUN 2023 | | | TAHUN 2022 | | | PERUBAHAN REALISASI |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| | PAGU DIPA | REALISASI | | PAGU DIPA | REALISASI | | |
| | Rp | Rp | % | Rp | Rp | % | |
| PENGADILAN NEGERI SLEMAN | | | | | | | |
| Bel. Pegawai | 12.632.144.000 | 12.344.048.018 | 97,72 | 12.524.756.000 | 12.504.278.566 | 99,84 | (2,12) |
| Bel. Barang Operasional | 1.689.108.000 | 1.673.893.203 | 99,10 | 1.926.737.000 | 1.890.425.901 | 98,12 | 0,98 |
| Bel. Barang Non Operasional | 6.963.000 | 5.982.000 | 85,91 | 5.000.000 | 4.970.000 | 99,40 | (13,49) |
| Bel. Modal | 455.700.000 | 452.581.356 | 99,32 | 409.060.000 | 409.050.000 | 100,00 | (0,68) |
| Jumlah DIPA BUA | 14.783.915.000 | 14.476.504.577 | 97,92 | 14.865.553.000 | 14.808.724.467 | 99,62 | (1,70) |

| JENIS BELANJA | TAHUN 2023 | | | TAHUN 2022 | | | PERUBAHAN REALISASI |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| | PAGU DIPA | REALISASI | | PAGU DIPA | REALISASI | | |
| | Rp | Rp | % | Rp | Rp | % | |
| PENGADILAN NEGERI SLEMAN | | | | | | | |
| Bel. Barang | 310.200.000 | 309.574.425 | 99,80 | 342.442.000 | 339.982.750 | 99,28 | 0,52 |
| Jumlah DIPA Badilum | 310.200.000 | 309.574.425 | 99,80 | 342.442.000 | 339.982.750 | 99,28 | 0,52 |

3. Pengadilan Negeri Bantul

| JENIS BELANJA | TAHUN 2023 | | | TAHUN 2022 | | | PERUBAHAN REALISASI |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | PAGU DIPA | REALISASI | | PAGU DIPA | REALISASI | | |
| | Rp | Rp | % | Rp | Rp | % | |
| PENGADILAN NEGERI BANTUL | | | | | | | |
| Bel. Pegawai | 5.448.991.000 | 5.349.065.553 | 98,17 | 5.608.756.000 | 5.602.620.636 | 99,89 | (1,72) |
| Bel. Barang Operasional | 1.299.114.000 | 1.298.434.311 | 99,95 | 1.395.634.000 | 1.391.497.637 | 99,70 | 0,24 |
| Bel. Barang Non Operasional | 0 | 0 | 0,00 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 | (100,00) |
| Bel. Modal | 28.000.000 | 28.000.000 | 100,00 | 652.500.000 | 651.570.000 | 99,86 | 0,14 |
| Jumlah DIPA BUA | 6.776.105.000 | 6.675.499.864 | 98,52 | 7.661.890.000 | 7.650.688.273 | 99,85 | (1,34) |

| JENIS BELANJA | TAHUN 2023 | | | TAHUN 2022 | | | PERUBAHAN REALISASI |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| | PAGU DIPA | REALISASI | | PAGU DIPA | REALISASI | | |
| | Rp | Rp | % | Rp | Rp | % | |
| PENGADILAN NEGERI BANTUL | | | | | | | |
| Bel. Barang | 132.700.000 | 132.601.460 | 99,93 | 136.945.000 | 136.919.842 | 99,98 | (0,06) |
| Jumlah DIPA Badilum | 132.700.000 | 132.601.460 | 99,93 | 136.945.000 | 136.919.842 | 99,98 | (0,06) |

4. Pengadilan Negeri Wates

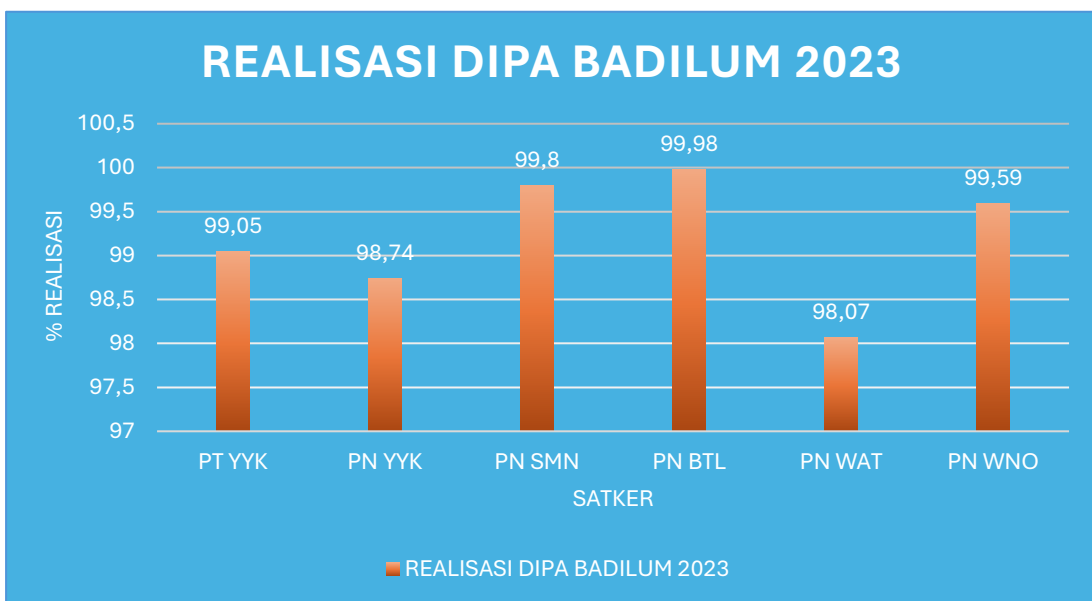
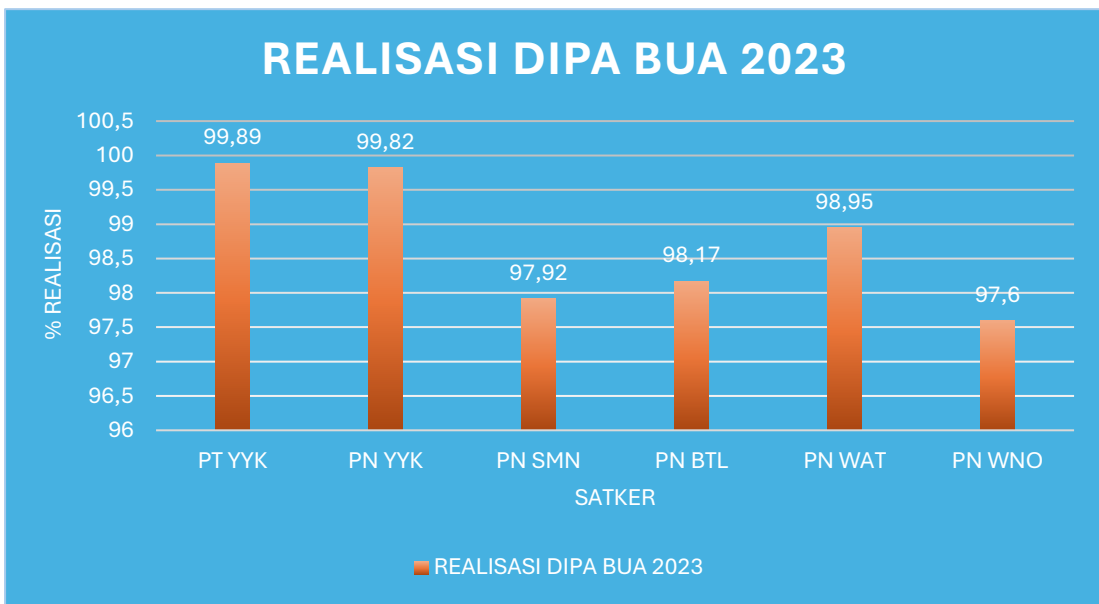
| JENIS BELANJA | TAHUN 2023 | | | TAHUN 2022 | | | PERUBAHAN REALISASI |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | PAGU DIPA | REALISASI | | PAGU DIPA | REALISASI | | |
| | Rp | Rp | % | Rp | Rp | % | |
| PENGADILAN NEGERI WATES | | | | | | | |
| Bel. Pegawai | 4.985.394.000 | 4.932.917.765 | 98,95 | 5.407.419.000 | 5.372.135.150 | 99,35 | (0,40) |
| Bel. Barang Operasional | 1.123.411.000 | 1.122.805.978 | 99,95 | 1.365.743.000 | 1.364.297.149 | 99,89 | 0,05 |
| Bel. Barang Non Operasional | 9.284.000 | 9.283.120 | 99,99 | 5.000.000 | 4.578.000 | 91,56 | 8,43 |
| Bel. Modal | 0 | 0 | 0,00 | 253.500.000 | 252.511.820 | 99,61 | (99,61) |
| Jumlah DIPA BUA | 6.118.089.000 | 6.065.006.863 | 99,13 | 7.031.662.000 | 6.993.522.119 | 99,46 | (0,33) |

| JENIS BELANJA | TAHUN 2023 | | | TAHUN 2022 | | | PERUBAHAN REALISASI |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| | PAGU DIPA | REALISASI | | PAGU DIPA | REALISASI | | |
| | Rp | Rp | % | Rp | Rp | % | |
| PENGADILAN NEGERI WATES | | | | | | | |
| Bel. Barang | 114.000.000 | 111.804.200 | 98,07 | 121.585.000 | 119.975.400 | 98,68 | (0,60) |
| Jumlah DIPA Badilum | 114.000.000 | 111.804.200 | 98,07 | 121.585.000 | 119.975.400 | 98,68 | (0,60) |

5. Pengadilan Negeri Wonosari

| JENIS BELANJA | TAHUN 2023 | | | TAHUN 2022 | | | PERUBAHAN REALISASI |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | PAGU DIPA | REALISASI | | PAGU DIPA | REALISASI | | |
| | Rp | Rp | % | Rp | Rp | % | |
| PENGADILAN NEGERI WONOSARI | | | | | | | |
| Bel. Pegawai | 3.745.113.000 | 3.627.331.866 | 96,86 | 3.626.513.000 | 3.587.193.736 | 98,92 | (2,06) |
| Bel. Barang Operasional | 1.230.379.000 | 1.226.425.492 | 99,68 | 1.318.789.000 | 1.317.709.519 | 99,92 | (0,24) |
| Bel. Barang Non Operasional | 4.642.000 | 4.642.000 | 100,00 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 | 0,00 |
| Bel. Modal | 110.000.000 | 109.404.700 | 99,46 | 64.000.000 | 64.000.000 | 100,00 | (0,54) |
| Jumlah DIPA BUA | 5.090.134.000 | 4.967.804.058 | 97,60 | 5.014.302.000 | 4.973.903.255 | 99,19 | (1,60) |

| JENIS BELANJA | TAHUN 2023 | | | TAHUN 2022 | | | PERUBAHAN REALISASI |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | PAGU DIPA | REALISASI | | PAGU DIPA | REALISASI | | |
| | Rp | Rp | % | Rp | Rp | % | |
| PENGADILAN NEGERI WONOSARI | | | | | | | |
| Bel. Barang | 101.886.000 | 101.466.225 | 99,59 | 100.044.000 | 99.958.699 | 99,91 | (0,33) |
| Jumlah DIPA Badilum | 101.886.000 | 101.466.225 | 99,59 | 100.044.000 | 99.958.699 | 99,91 | (0,33) |



B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. SARANA DAN PRASARANA TANAH, GEDUNG DAN KENDARAAN

a. Keadaan Sarana dan Prasarana Tanah, Gedung dan Kendaraan

Seluruh pengadilan di wilayah D.I. Yogyakarta menempati tanah dan bangunan sendiri dimana status kepemilikan sudah atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dibawah ini adalah daftar luas tanah dan bangunan gedung pengadilan di Wilayah DI. Yogyakarta :

1. Tanah dan Bangunan Gedung

Tabel 4.13 : Daftar Tanah dan Bangunan Gedung Tahun 2023

| No | Satker | Luas Tanah (m ²) | Bangunan (m ²) | Peruntukan | Pemegang Hak Atas Tanah |
|----|---------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | PT Yogyakarta | 5.086 | 2.623 | Gedung Kantor | Pemerintah RI Cq. MA RI |
| | | | 545 | Gedung Kantor, Perpustakaan dan Arsip | |
| 2 | PN Yogyakarta | 7.385 | 3.610 | Gedung Kantor | Pemerintah RI Cq. MA RI |
| | | 3.163 | 1.900 | Gedung Tipikor dan PHI | Pemerintah RI Cq. MA RI |
| 3 | PN Sleman | 2.730 | 3.195 | Gedung Kantor | Pemerintah RI Cq. MA RI |
| 4 | PN Bantul | 2.759 | 2.284 | Gedung Kantor | Pemerintah RI Cq. MA RI |
| 5 | PN Wates | 2.850 | 2.264 | Gedung Kantor | Pemerintah RI Cq. MA RI |
| 6 | PN Wonosari | 2.891 | 2.290 | Gedung Kantor | Pemerintah RI Cq. MA RI |

2. Rumah Negara

Tabel 4.14 : Daftar Rumah Negara Tahun 2023

| No | Satker | Jumlah | Kondisi | | | Pemegang Hak Atas Tanah |
|----|---------------|--------|---------|--------------|-------------|-------------------------|
| | | | Baik | Rusak Sedang | Rusak Berat | |
| 1 | PT Yogyakarta | 10 | 8 | 2 | - | Pemerintah RI Cq. MA RI |
| | | 4 | 4 | - | - | Sultan Ground |
| 2 | PN Yogyakarta | 19 | 8 | 11 | - | Pemerintah RI Cq. MA RI |
| 3 | PN Sleman | 12 | 11 | - | 1 | Pemerintah RI Cq. MA RI |

| No | Satker | Jumlah | Kondisi | | | Pemegang Hak Atas Tanah |
|----|-------------|--------|---------|--------------|-------------|-------------------------|
| | | | Baik | Rusak Sedang | Rusak Berat | |
| 4 | PN Bantul | 8 | 8 | - | - | Pemerintah RI Cq. MA RI |
| 5 | PN Wates | 8 | 8 | - | - | Pemerintah RI Cq. MA RI |
| 6 | PN Wonosari | 10 | 10 | - | - | Pemerintah RI Cq. MA RI |

3. Kendaraan Dinas Roda 2

Tabel 4.15 : Daftar Kendaraan Roda 2 Tahun 2023

| No | Satker | Merk | Type | Jumlah | Kondisi |
|----|---------------|----------|-----------------------|--------|--------------|
| 1 | PT Yogyakarta | Honda | Supra100 | 4 | Baik |
| | | Honda | Supra 125 | 4 | Baik |
| | | Honda | GLIII | 3 | Baik |
| | | Honda | NF125 | 1 | Baik |
| 2 | PN Yogyakarta | Honda | Supra 125 | 3 | Baik |
| | | Honda | Honda GL. III Sport | 1 | Baik |
| | | Honda | Honda Supra Fit X | 1 | Baik |
| | | Honda | Honda Supra Fit | 4 | Baik |
| | | Honda | Honda GP III Mega Pro | 2 | Baik |
| | | Honda | Honda NF 100 D | 1 | Baik |
| 3 | PN Sleman | Honda | Vario | 1 | Baik |
| 4 | PN Bantul | Honda | Supra X125 | 6 | Baik |
| | | Honda | Mega Pro | 2 | Baik |
| 5 | PN Wates | Honda | GL | 1 | Rusak Ringan |
| | | Honda | NF100 | 2 | Baik |
| | | Honda | GL Pro III | 2 | Baik |
| | | Honda | NF 125 SD | 1 | Baik |
| | | Suzuki | Smash | 4 | Baik |
| | | Honda | Supra 125 | 2 | Baik |
| | | Honda | Revo | 3 | Baik |
| | | Kawasaki | KLX BF | 2 | Baik |
| | | Honda | CBR 150 | 2 | Baik |
| | | Honda | Vario 110 | 2 | Baik |
| 6 | PN Wonosari | Honda | GLP III | 5 | Baik |
| | | Honda | Supra X125 | 2 | Baik |

4. Kendaraan Dinas Roda 4

Tabel 4.16 : Daftar Kendaraan Dinas Roda 4 Tahun 2023

| No | Satker | Merk | Type | Jumlah | Kondisi | Keterangan |
|----|---------------|------------|--------------------------------|--------|--------------|------------------------------------|
| 1 | PT Yogyakarta | Toyota | Altis | 1 | Baik | |
| | | Toyota | Vios | 1 | Baik | |
| | | Toyota | Innova | 1 | Baik | |
| | | Toyota | Camry | 1 | Baik | Sewa |
| | | Toyota | Pajero | 1 | Baik | Sewa |
| | | Toyota | Hiace | 1 | Baik | Sewa |
| | | Toyota | Innova Zenix | 2 | Baik | Sewa |
| | | Mitsubishi | Xpander | 1 | Baik | Sewa |
| 2 | PN Yogyakarta | Toyota | Altis | 2 | Baik | 1 unit Sewa |
| | | Toyota | Vios | 2 | Baik | |
| | | Toyota | Innova G | 1 | Baik | |
| | | Toyota | Innova V | 1 | Baik | |
| | | Toyota | Kijang KF 40 | 1 | Baik | Pinja Pakai dari Pemkot Yogyakarta |
| | | Toyota | Kijang LGX | 1 | Baik | |
| 3 | PN Sleman | Toyota | Innova | 2 | Baik | |
| | | Toyota | Innova | 1 | Baik | Pinjam Pakai dari Pemda Sleman |
| 4 | PN Wates | Toyota | Innova | 1 | Baik | |
| | | Toyota | Kijang LX | 1 | Rusak Ringan | |
| | | Isuzu | Panther | 1 | Baik | |
| | | Toyota | Kijang Innova Venturer 2.0 A/T | 1 | Baik | |
| | | Toyota | All New Rush TRD A/T | 1 | Baik | |
| 5 | PN Bantul | Toyota | Innova | 2 | Baik | |
| | | Toyota | Avanza | 1 | Baik | |
| | | Toyota | Altis | 1 | Baik | |
| 6 | PN Wonosari | Toyota | Innova | 3 | Baik | 1 unit Pinjam Pakai dari Pemda |
| | | Toyota | Avanza | 1 | Baik | |

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung

Tabel 4.17 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2023

| No | Satker | Jenis Pengadaan |
|----|---------------|-----------------------------|
| 1 | PT Yogyakarta | - |
| 2 | PN Yogyakarta | - |
| 3 | PN Sleman | - |
| 4 | PN Bantul | - |
| 5 | PN Wates | - |
| 6 | PN Wonosari | Prasarana Saluran air hujan |

c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung

Tabel 4.18 : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2023

| No | Satker | Jenis pemeliharaan | Keterangan |
|----|---------------|---|------------|
| 1. | PT Yogyakarta | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Area Basement Gedung Timur 2. Pemeliharaan Saluran Air, Glonteng dan Water Torn 3. Pemeliharaan Ruang Kerja 4. Pemeliharaan Gedung Timur 5. Perbaikan Tempat Pembuangan Sampah 6. Perbaikan Jaringan Listrik Gedung Timur 7. Pengecatan Pagar 8. Pemeliharaan Perpustakaan dan Mini Class 9. Pasang shower toilet putera Lt 2 (2 buah) 10. Perbaikan Kebocoran Gedung 11. Penggantian eternit dan lampu atas tangga ruang sidang utama 12. Pengecatan dinding tangga arah ke ruang KPT, tangga gedung timur, tangga arah ke basement, garasi sisi depan dan barat 13. Penggantian keramik toilet pos satpam timur 14. Penggantian Gordyin Ruang Hakim 15. Pengecatan kanstin 16. Perbaikan Toilet Ruang KPT 17. Perbaikan Toilet Ruang WKPT 18. Penambahan Lampu Pagar, Sorot Pilar, LED dan Perbaikan PJU barat 19. Perbaikan keramik / lantai (ruang sidang, ruang kerja, lobi2 dan teras) 20. Area Parkir Tamu Roda 2 (Penambahan Atap) dan Talang Garasi 21. Penggantian exhaust fan 22. Perbaikan Lampu Led Letter Pengadilan Tinggi Yogyakarta 23. Pemeliharaan Jaringan Listrik Berupa Penggantian Tufur dan NFB 24. Pemeliharaan Rumah Dinas | |

| No | Satker | Jenis pemeliharaan | Keterangan |
|----|---------------|--|------------|
| 2 | PN Yogyakarta | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengecatan Gedung Selatan Kantor Pengadilan 2. Perbaikan Keramik Aula Kantor Pengadilan 3. Perbaikan Halaman Rumah Dinas Glagahsari (Wakil Ketua) 4. Perbaikan Rumah Dinas Gambiranom 5. Penggantian Atap Ruang Arsip Keuangan 6. Perbaikan Plafon Ruang Arsip Keuangan 7. Penggantian Lampu LED Kantor Pengadilan 8. Perbaikan Ruang Arsip Hukum 9. Rekondisi Meja Ketua 10. Pemeliharaan Backdrop Ruang Ketua 11. Pemeliharaan Panel Dinding Ruang Ketua 12. Pemeliharaan Plafon Ruang Rapat 13. Pengecatan Gedung Tipikior (Interior) 14. Pemeliharaan Backdrop Ruang Rapat 15. Rekondisi Meja Rapat 16. Pemeliharaan Panel Dinding Ruang Rapat 17. Pekerjaan Pengecatan Pagar Kantor Pengadilan 18. Pekerjaan Pemeliharaan Torn dan Sterilisasi Air 19. Pemeliharaan Halaman Rumah Dinas Gambiranom | |
| 3 | PN Sleman | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Rumah Dinas Ketua dan Wakil Ketua 2. Pemeliharaan Kebocoran Atap Gedung Pengadilan 3. Pemeliharaan Gedung Pengadilan Anak 4. Perbaikan Genset 5. Perbaikan CCTV 6. Perbaikan PABX 7. Pengecatan Lahan Parkir dan Titik Kumpul | Baik |
| 4 | PN Bantul | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan rutin sarana prasarana ruangan kerja 2. Perawatan rutin kendaraan bermotor | |
| 5 | PN Wates | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan rutin sarana prasarana ruangan kerja 2. Perawatan rutin kendaraan bermotor | |
| 6 | PN Wonosari | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan plafon gypsum luar ruang hakim. 2. Pengecatan dinding luar ruangan. 3. Pemasangan backdrop sisi depan ruang PTSP 4. Renovasi papan tiang bendera. 5. Renovasi selokan sisi selatan kantor. | |

d. Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung

Tabel 4.19 : Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2023

| No | Satker | Tanggal | Jenis Barang | Keterangan |
|----|---------------|---------|--------------|------------|
| 1 | PT Yogyakarta | - | - | - |
| 2 | PN Yogyakarta | - | - | - |

| No | Satker | Tanggal | Jenis Barang | Keterangan |
|----|-------------|---------|--------------|------------|
| 3 | PN Sleman | - | - | - |
| 4 | PN Bantul | - | - | - |
| 5 | PN Wates | - | - | - |
| 6 | PN Wonosari | - | - | - |

2. SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG

Hal-hal yang dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas Pengadilan antara lain adanya sarana dan prasarana fasilitas penunjang yang memadai. Dalam hal ini sarana dan prasarana fasilitas Gedung pada Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Keadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Tabel 4.20 : Keadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2023

| No | Nama Barang | Jumlah Sarana dan Prasarana | | | | | |
|----|--------------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|
| | | PT Yogyakarta | PN Yogyakarta | PN Sleman | PN Bantul | PN Wates | PN Wonosari |
| 1 | Komputer | 62 | 121 | 68 | 54 | 74 | 52 |
| 2 | Laptop | 27 | 58 | 27 | 31 | 21 | 26 |
| 3 | Infokus/LCD | 5 | 2 | 5 | 2 | 15 | 2 |
| 4 | PABX | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Mesin Ketik | 3 | 25 | 3 | - | 1 | 9 |
| 6 | Mesin Stensil | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 7 | Mesin Fotokopi | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| 8 | AC | 66 | 64 | 50 | 25 | 37 | 27 |
| 9 | Faximile | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Brankas | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Sound system | 8 | 8 | 4 | 2 | 11 | 3 |
| 12 | Mesin Absensi | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Tabung Pemadam Api | 20 | 1 | - | - | 5 | 10 |
| 14 | CCTV | 32 | 5 | 2 | 9 | 8 | 2 |
| 15 | UPS | 49 | 5 | 12 | 6 | 7 | 10 |
| 16 | Genset | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Handy Cam | 1 | 2 | 1 | - | - | - |

| No | Nama Barang | Jumlah Sarana dan Prasarana | | | | | |
|----|----------------------|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | PT Yogyakarta | PN Yogyakarta | PN Sleman | PN Bantul | PN Wates | PN Wonosari |
| 18 | Pesawat telepon | 35 | 8 | 15 | 3 | 1 | 13 |
| 19 | Printer | 30 | 46 | 41 | 28 | 48 | 35 |
| 20 | Scanner | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 21 | Server | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 22 | Lemari Kayu | 26 | 73 | 49 | 34 | 60 | 28 |
| 23 | Lemari Besi | 67 | 30 | 10 | 2 | 6 | 25 |
| 24 | Filling Kabinet Kayu | 4 | - | 2 | 1 | - | - |
| 25 | Filling Kabinet Besi | 45 | 25 | 24 | 27 | 8 | 3 |
| 26 | Buffet | 4 | 8 | - | 2 | - | - |
| 27 | Rak | 5 | 74 | 36 | 52 | 19 | 21 |
| 28 | Meja Kerja Kayu | 134 | 236 | 250 | 116 | 115 | 147 |
| 29 | Kursi Kayu | 33 | 68 | 128 | 42 | 115 | 48 |
| 30 | Kursi Besi Metal | 300 | 552 | 298 | 220 | 174 | 207 |
| 31 | Sice | 29 | 17 | 23 | 11 | 13 | 16 |
| 32 | Bangku Panjang Kayu | 3 | 64 | 67 | 26 | - | 25 |
| 33 | Meja Rapat | 22 | 3 | 1 | 2 | 6 | - |
| 34 | Meja Komputer | 23 | 12 | 6 | 5 | 20 | 9 |
| 35 | Meja Resepsionis | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Kamera | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | HT | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 39 | Sekat | - | 7 | 10 | 3 | 4 | 3 |
| 40 | Meja Sidang | - | - | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 41 | Kursi Hakim | - | - | 20 | 12 | 12 | 7 |
| 42 | Meja Telepon | - | 3 | 10 | - | - | 2 |
| 43 | Mesin Hitung | - | 1 | 5 | - | - | 4 |
| 44 | Kipas Angin | - | 28 | 33 | 14 | - | 10 |
| 45 | Televisi | 6 | 19 | 1 | 3 | 2 | 14 |
| 46 | RIG | 1 | - | - | - | - | - |
| 47 | Kulkas | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 48 | External Hardisk | 3 | - | 1 | - | - | 5 |
| 49 | Hardisk | 2 | - | - | - | - | 5 |
| 50 | Anti Virus | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 51 | Acces Point | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 |

| No | Nama Barang | Jumlah Sarana dan Prasarana | | | | | |
|----|-------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|
| | | PT Yogyakarta | PN Yogyakarta | PN Sleman | PN Bantul | PN Wates | PN Wonosari |
| 52 | Rak Server | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 53 | Router | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 54 | Air Curtain | - | 0 | 3 | - | - | - |
| 55 | Switch Hub | 3 | | - | 1 | 3 | - |
| 56 | Videotron | 1 | | - | | | |

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Tabel 4.21 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2023

| No | Satker | Jenis Pengadaan |
|----|---------------|---|
| 1 | PT Yogyakarta | <ul style="list-style-type: none"> - Sewa 8 Unit Mesin Fotocopy untuk PT dan PN se D.I. Yogyakarta - 1 Paket Meubelair - 4 Unit AC - 1 Paket Sound System - 1 Unit Videotron |
| 2 | PN Yogyakarta | <ul style="list-style-type: none"> - 3 Unit Printer - 3 Unit Meja Kerja Kayu - 8 Unit Kursi besi/metal |
| 3 | PN Sleman | <ul style="list-style-type: none"> - 1 unit Station Wagon - 3 unit meja kayu kerja - 3 unit kursi besi metal - 1 unit laptop - 4 unit printer - 3 unit scanner |
| 4 | PN Bantul | <ul style="list-style-type: none"> - 1 unit CCTV - 5 unit meja kerja kayu - 5 unit kursi besi/ metal - 5 unit meja computer - 4 unit AC Split - 1 unit Laptop - 1 unit Printer (Peralatan Personal Komputer) - 3 unit Scanner (Peralatan Personal Komputer) |
| 5 | PN Wates | - |
| 6 | PN Wonosari | <ul style="list-style-type: none"> - 1 unit CCTV - Camera Control Television System - 4 unit Meja Kerja Kayu - 2 unit Kursi Besi/Metal - 1 unit Partisi |

c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Tabel 3.23 : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2023

| No | Satker | Jenis Pemeliharaan |
|----|---------------|---|
| 1 | PT Yogyakarta | 1. Pemeliharaan peralatan mesin : <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan kendaraan dinas - Perawatan genset - Perawatan AC, PC, Printer, sound, elektrikal, dll 2. Pemeliharaan jaringan : <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan listrik - Jaringan telpon - Jaringan internet |
| 2 | PN Yogyakarta | 1. Pemeliharaan Inventaris Kantor 2. Perawatan kendaraan dinas 3. Perawatan genset 4. Perawatan AC, PC, Printer, Fotokopi, Soundsystem, Notebook 5. Pemeliharaan Jaringan Internet: 6. Jaringan CCTV |
| 3 | PN Sleman | 1. Pemeliharaan peralatan mesin : <ul style="list-style-type: none"> a. Perawatan Kendaraan Dinas b. Perawatan Genset c. Perawatan AC, PC, Printer, Fax, Fotokopi, Sound, Elektrikal, dll 2. Pemeliharaan jaringan : <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Listrik b. Jaringan Telepon c. Jaringan Internet |
| 4 | PN Bantul | 1. Pemeliharaan peralatan mesin : <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan kendaraan dinas - Perawatan AC, laptop, PC, Printer, 2. Pemeliharaan jaringan : <ul style="list-style-type: none"> - Listrik, - Internet |
| 5 | PN Wates | 1. Pemeliharaan peralatan mesin : <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan kendaraan dinas - Perawatan genset - AC, Laptop, PC, Printer, Fotocopy, sound system, elektrikal, dll 2. Pemeliharaan jaringan : <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan listrik - Jaringan telpon - Jaringan internet |
| 6 | PN Wonosari | 1. Pemeliharaan peralatan mesin : <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan kendaraan dinas roda 4 (7 unit) - Perawatan kendaraan dinas roda 2 (4 unit) - Perawatan & BBM Genset 100 KVA (1 unit) - Perawatan AC, Laptop, PC, Printer, Fotocopy, sound system, elektrikal, dll 2. Pemeliharaan jaringan : <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan listrik - Jaringan internet |

d. Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Tabel 4.24 : Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2023

| No | Satker | Tanggal | Jenis Barang | Keterangan |
|----|---------------|---------|--|--|
| 1 | PT Yogyakarta | - | - | - |
| 2 | PN Yogyakarta | - | - | - |
| 3 | PN Sleman | - | - | - |
| 4 | PN Bantul | - | 1) 1 (Satu) Unit Kijang KF-52 Super 2) 1 (Satu) unit motor A-100 3) 1 (Satu) unit motor GL 100 4) 1 (Satu) unit motor Grand C100 5) 1 (Satu) unit motor Supra X 6) 1 (Satu) unit motor Supra Fit | Tahun 1996 Tahun 1982 Tahun 1991 Tahun 1993 Tahun 2001 Tahun 2004 |
| 5 | PN Wates | - | - | - |
| 6 | PN Wonosari | - | - | - |

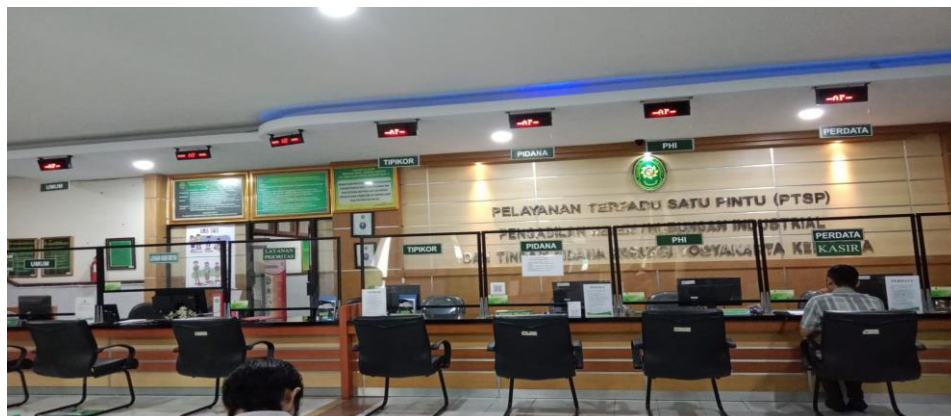
3. SARANA DAN PRASARANA UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PERADILAN

Untuk meningkatkan dan melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal di lingkungan peradilan perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang representative sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang prima dan berkualitas bagi masyarakat pencari keadilan maka upaya yang telah di lakukan meliputi :

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal
2. Merawat dan memelihara sarana dan prasarana yang ada dengan prinsip pakai rawat rusak perbaiki
3. Membuat dan/atau menjaga kebersihan dan keindahan taman di lingkungan kantor sehingga menjadi asri dan hijau
4. Melakukan penataan ruangan kerja yang rapi dan nyaman dengan memperhatikan unsur estetika ruangan.

Gambar 4.7 : Meja layanan di PTSP pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Yogyakarta





Tujuan penerapan PTSP sendiri tidak lain untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

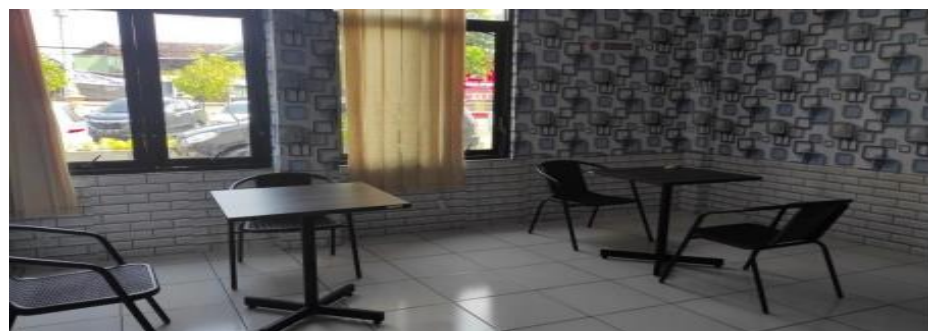
Selain itu pada Pengadilan Negeri telah dilakukan Pemisahan ruang pelayanan administrasi (PTSP) dan ruang pelayanan persidangan, dimana telah disediakan ruang tunggu masing-masing sesuai dengan

jenis layanannya tujuannya agar pengunjung dan pencari keadilan merasa nyaman.





Gambar 4.13 : Co-working space dan ruang tamu terbuka Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Yogyakarta



C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung administrasi perkara berbasis elektronik khususnya pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan E-Court serta E-Office, dukungan teknologi informasi mutlak dibutuhkan. Pembenahan dan peningkatan teknologi informasi merupakan salah satu prioritas demi terwujudnya keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi Pengadilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.

Untuk mewujudkan pelaksanaan administrasi pengelolaan yang tertib, modern dan akuntabel, Mahkamah Agung dan jajaran dibawahnya telah berkomitmen bahwa seluruh Badan Peradilan di Mahkamah Agung akan beralih dari administrasi Pengadilan yang dilakukan secara manual ke administrasi yang berbasis teknologi informasi.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki komitmen dan kebijakan yang salah satunya adalah dengan melakukan pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat supervisi, operator maupun user baik ke dalam instansi Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun kepada seluruh Pengadilan Negeri di bawahnya dalam melakukan implementasi terhadap setiap aplikasi yang dilakukan secara rutin.

Keadaan perangkat teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Keadaan Teknologi Informasi dan Pendukungnya Tahun 2023

| No | Satuan Kerja | Keadaan Teknologi Informasi dan pendukungnya | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|--------|-----|--------|---------|--------------|--------|------------|---------------|-------|
| | | Internet | Server | PC | Laptop | Printer | Access Point | Router | Switch Hub | LCD Informasi | KiosK |
| 1 | PT Yogyakarta | 150 Mbps | 4 | 48 | 30 | 18 | 9 | 1 | 4 | 2 | - |
| 2 | PN Yogyakarta | 180 Mbps | 3 | 115 | 58 | 47 | 9 | 4 | 16 | 5 | 5 |
| 3 | PN Sleman | 120 Mbps | 3 | 68 | 41 | 41 | 22 | 2 | 5 | 9 | 3 |
| 4 | PN Bantul | 120 Mbps | 2 | 59 | 31 | 29 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | PN Wates | 150 Mbps | 3 | 74 | 21 | 50 | 9 | 1 | 10 | 3 | 1 |
| 6 | PN Wonosari | 100 Mbps | 3 | 52 | 26 | 35 | 13 | 2 | 11 | 4 | 2 |

Gambar 4. 1 Server Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se Wilayah D.I. Yogyakarta



1. Implementasi e-Court

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta telah melaksanakan E-Court sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Secara garis besar, proses E-Court dimulai pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran elektronik (*e-payment*), pemanggilan (*e-summons*) dan persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Dalam implementasinya pada tingkat banding, dilakukan verifikasi terhadap Pengguna Terdaftar yaitu Advokat yang telah melakukan pendaftaran secara mandiri. Adapun jumlah Advokat yang

sudah terdaftar dan terverifikasi di E-Court Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah:

Tabel 4. 2 Keadaan Verifikasi Advokat pada aplikasi E-Court Pengadilan Tinggi Yogyakarta

| No | Akun Advokat | Jumlah |
|----|---|--------|
| 1 | Data advokat yang terdaftar di database | 1.617 |
| 2 | Jumlah data advokat yang sudah diverifikasi Pengadilan Tinggi | 1.524 |
| 3 | Jumlah data advokat yang sudah diverifikasi namun Data Masih salah (belum diperbaiki) | 93 |

Data diatas merupakan data keadaan verifikasi Advokat pada aplikasi E-Court Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Data advokat yang ada di aplikasi E-Court sebanyak 1.617 advokat. Data Advokat yang sudah mendaftar akun dan telah ter-verifikasi sebanyak 1.524 akun dan data yang sudah diverifikasi namun Data Masih salah (belum diperbaiki) sebanyak 93 akun.

Adapun statistik implementasi E-Court pada Pengadilan Negeri se D.I.Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Jumlah Perkara di Wilayah D.I. Yogyakarta yang Daftarkan Melalui e-Court Tahun 2023

| No | Satker | Sisa Perkara 2022 | Perkara Masuk | Cabut | Putus | Sisa Perkara 2023 |
|--------|------------------------------|-------------------|---------------|-------|-------|-------------------|
| 1 | Pengadilan Tinggi Yogyakarta | 3 | 93 | 0 | 89 | 7 |
| 2 | Pengadilan Negeri Yogyakarta | 102 | 818 | 42 | 801 | 101 |
| 3 | Pengadilan Negeri Sleman | 31 | 1612 | 80 | 1480 | 183 |
| 4 | Pengadilan Negeri Bantul | 35 | 449 | 52 | 370 | 62 |
| 5 | Pengadilan Negeri Wates | 17 | 533 | 0 | 513 | 20 |
| 6 | Pengadilan Negeri Wonosari | 12 | 367 | 0 | 348 | 31 |
| Jumlah | | 200 | 3872 | 174 | 3601 | 404 |

Gambar 4. 2 Pojok e-court corner Pada Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta



2. Implementasi SIPP

SIPP dari waktu ke waktu terus mengalami pembenahan serta peningkatan fasilitas. Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan seluruh Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta telah menerapkan SIPP, dimana data perkara pada SIPP Tingkat Banding dan SIPP Pengadilan Negeri saling terkoneksi sehingga informasi perkara dapat diakses masyarakat cukup melalui SIPP Pengadilan Negeri, baik itu proses pada tingkat pertama maupun banding. Disamping itu, putusan yang diupload ke SIPP secara otomatis juga terupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Secara rutin, database SIPP pada Pengadilan Negeri dilakukan sinkronisasi, baik ke Mahkamah Agung, website masing-masing Pengadilan Negeri juga ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menggunakan SIPP versi 4.1.1, sedangkan pada Pengadilan Negeri menggunakan SIPP versi 5.1.0. Alamat SIPP Web pada Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Alamat SIPP Pengadilan Negeri se Wilayah D.I. Yogyakarta

| No | Satker | Alamat SIPP |
|----|---------------|-----------------------------|
| 1 | PT Yogyakarta | banding.mahkamahagung.go.id |
| 2 | PN Yogyakarta | sipp.pn-yogyakarta.go.id |
| 3 | PN Sleman | pn-sleman.go.id/sipp |
| 4 | PN Bantul | sipp.pn-bantul.go.id |
| 5 | PN Wates | sipp.pn-wates.go.id |
| 6 | PN Wonosari | sipp.pn-wonosari.go.id |

Gambar 4. 3 Tampilan SIPP Web Pengadilan Negeri



Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Beranda | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

DATA SELURUH PERKARA Pembaharuan Data : Kamis, 29 Dec, 2022 19:41:45 WIB, Total : 2 Perkara

| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
|----|-----------------------|------------------|---------------------|--|----------------------|-------------|----------|
| 1 | 129/Pdt.G/2021/PN Ykk | 13 Oct 2021 | Penceraian | Pengugat: Diutamakan Tergugat: Diutamakan | Minutasi | 75 Hari | [detail] |
| 2 | 29/Pdt.G/2021/PN Ykk | 10 Mar 2021 | Jual Beli Tanah | Pengugat: 1. JUSIA 2. GEMAWAH WAHYADHATMIKA Tergugat: 1. YEBER INDARTO 2. ACUS ARTADI | Pengiriman Berkas PK | 190 Hari | [detail] |



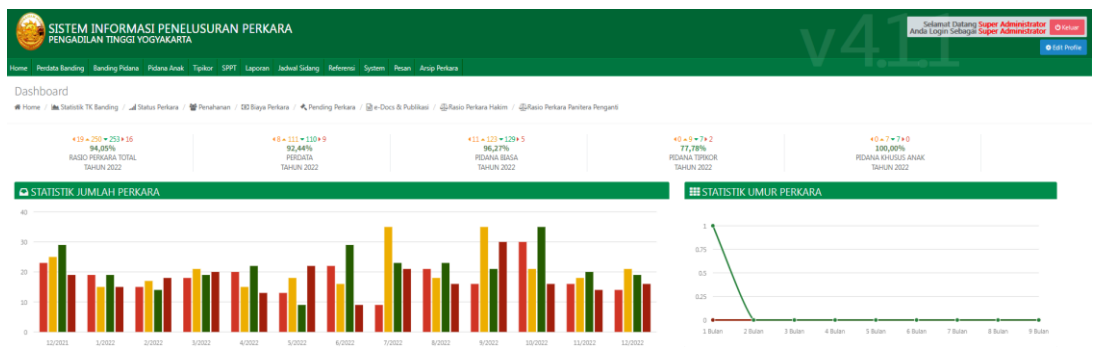
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI WATES

Beranda | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

DATA SELURUH PERKARA Pembaharuan Data : Jumat, 30 Dec, 2022 10:00:48 WIB, Total : 144.053 Perkara

| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
|----|-----------------------|------------------|--|-------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 1 | 396/Pdt.P/2022/PN Wat | 30 Dec 2022 | Akta Kematian | Pemohon: MARSDI OTOMO ALJEMIO | Pendaftaran Perkara | 1 Hari | [detail] |
| 2 | 395/Pdt.P/2022/PN Wat | 29 Dec 2022 | Perubahan Ganti Nama | Pemohon: MULYONO | Sidang pertama | 1 Hari | [detail] |
| 3 | 393/Pdt.P/2022/PN Wat | 28 Dec 2022 | Akta Kematian | Pemohon: RATNA TRI WAHYUNINGSIH | Sidang pertama | 2 Hari | [detail] |
| 4 | 394/Pdt.P/2022/PN Wat | 28 Dec 2022 | Akta Kematian | Pemohon: RATNA TRI WAHYUNINGSIH | Sidang pertama | 2 Hari | [detail] |
| 5 | 392/Pdt.P/2022/PN Wat | 26 Dec 2022 | Akta Kematian | Pemohon: MUDJIZANA | Persidangan | 4 Hari | [detail] |
| 6 | 391/Pdt.P/2022/PN Wat | 23 Dec 2022 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon: PANGGIL INUNG JOKO SANTOSO | Persidangan | 7 Hari | [detail] |

Gambar 4. 4 Tampilan SIPP Web Pengadilan Tingkat Banding



SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Home | Perdata Banding | Banding Pidana | Pidana Anak | Tipikal | SPT | Laporan | Jadwal Sidang | Referensi | System | Papan | Arsip Perkara

Dashboard

Home | Statistik TK Banding | Status Perkara | Penahanan | SD Baya Perkara | Tanding Perkara | Docs & Publikasi | Rasio Perkara Hakim | Rasio Perkara Penitera Pengant

19 + 20 = 29 + 15
84,09%
 RASIO PERKARA TOTAL
 TAHUN 2022

11 + 11 = 12 + 9
92,44%
 PERDATA
 TAHUN 2022

11 + 11 = 12 + 5
90,27%
 PIDANA BIASA
 TAHUN 2022

10 + 9 = 7 + 2
77,27%
 PIDANA TERORIS
 TAHUN 2022

10 + 7 = 7 + 0
300,00%
 PIDANA KHUSUS ANAK
 TAHUN 2022

STATISTIK JUMLAH PERKARA

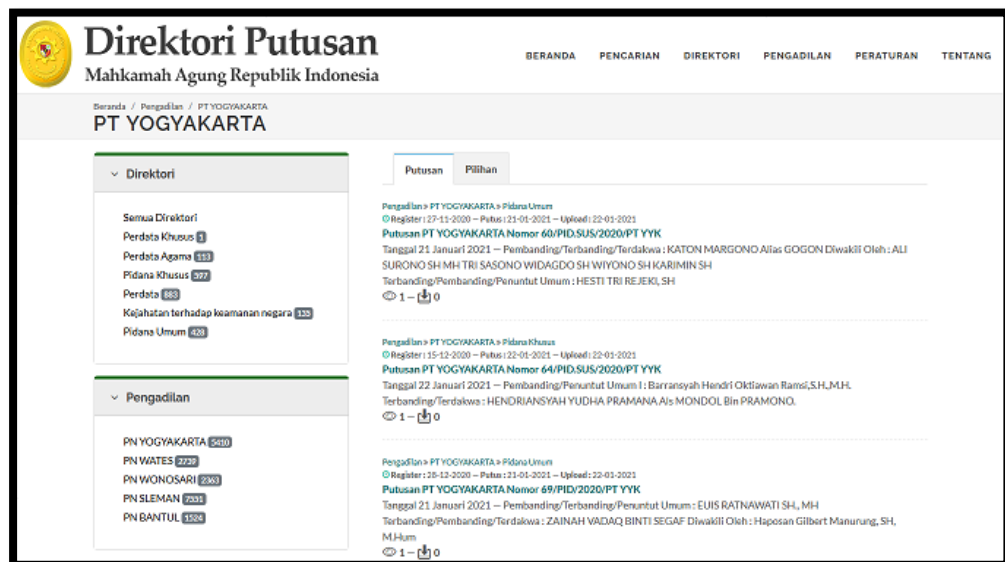
STATISTIK UMUR PERKARA

3. Implementasi Aplikasi Pendukung

a. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Direktori Putusan merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengupload perkara yang menempuh upaya hukum baik banding, kasasi maupun PK dan perkara tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun setelah implementasi SIPP versi 3.2.0, data putusan merupakan hasil sinkronisasi dari SIPP pengadilan. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI untuk Peradilan Umum Wilayah D.I. Yogyakarta dapat diakses pada Alamat : <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pt-yogyakarta.html>

Gambar 4. 5 Tampilan Direktori Putusan Web Pengadilan Tingkat Yogyakarta



b. Aplikasi Eraterang

ERATERANG atau elektronik surat keterangan merupakan produk aplikasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri / Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. Eraterang sebagai media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via HP/ Gawai dan Komputer/ PC). Jenis Surat Keterangan yang bisa dilayani melalui aplikasi Eraterang :

- Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit;
- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana;
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya;
- Surat Keterangan di Pidana karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik;
- Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara.

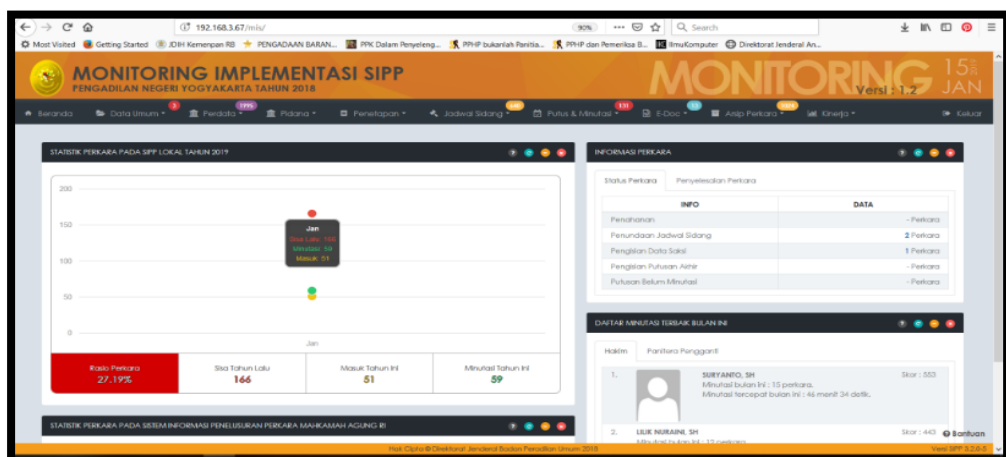
Gambar 4. 6 Tampilan Web Aplikasi Eraterang Peradilan Tingkat Pertama



c. Aplikasi Monitoring SIPP

Aplikasi Monitoring adalah sebuah aplikasi turunan dari SIPP yang digunakan untuk memonitoring dan evaluasi implementasi SIPP di pengadilan. Fitur-fitur aplikasi monitoring cukup membantu dalam evaluasi dan pengawasan internal, namun sangat perlu dikembangkan lagi sesuai kebutuhan terhadap informasi pengawasan SIPP.

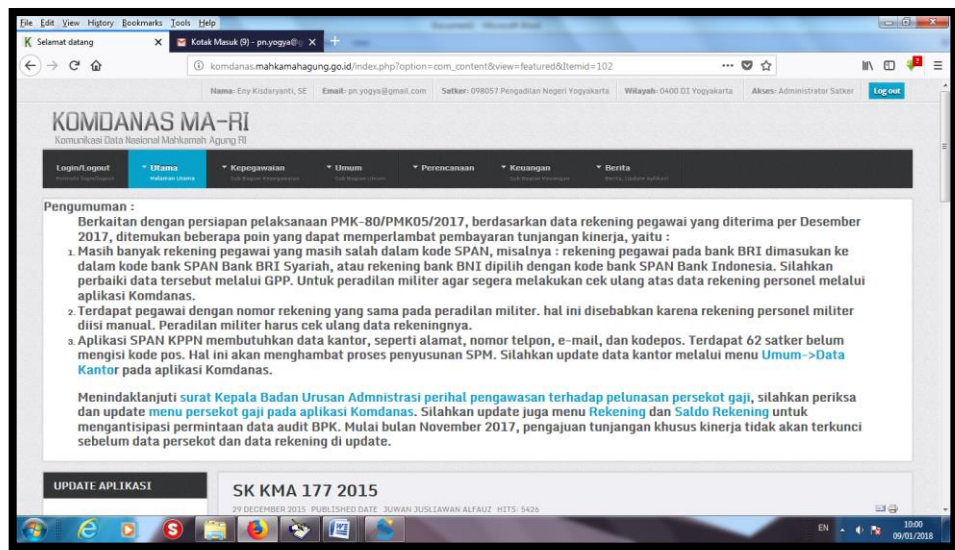
Gambar 4. 7 Tampilan Web Aplikasi Monitoring SIPP Peradilan Tingkat Pertama



d. Aplikasi KOMDANAS

KOMDANAS atau Komunikasi Data Nasional merupakan sebuah sistem aplikasi komputasi terpadu yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi. Penggunaan teknologi informasi yang diterapkan dalam bentuk aplikasi KOMDANAS ini akan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung.

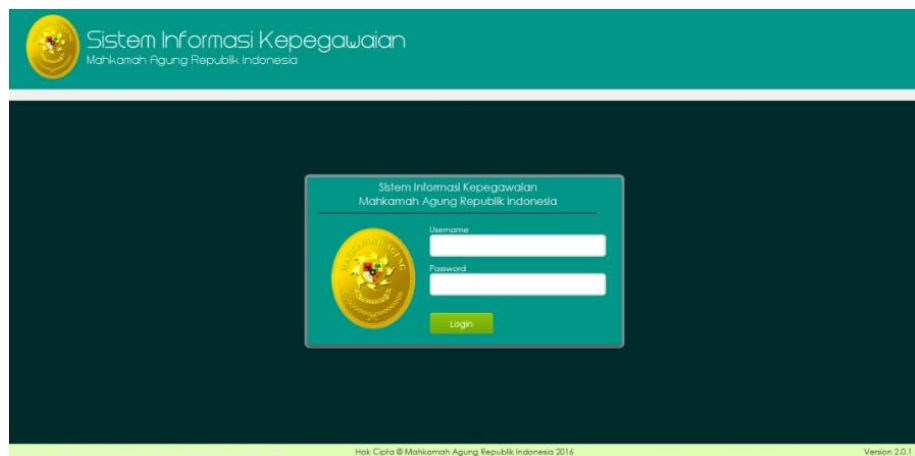
Gambar 4. 8 Tampilan Web Aplikasi Komdanas bagi semua Peradilan



e. Aplikasi SIKEP dan aplikasi kepegawaian dari BKN

Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI.

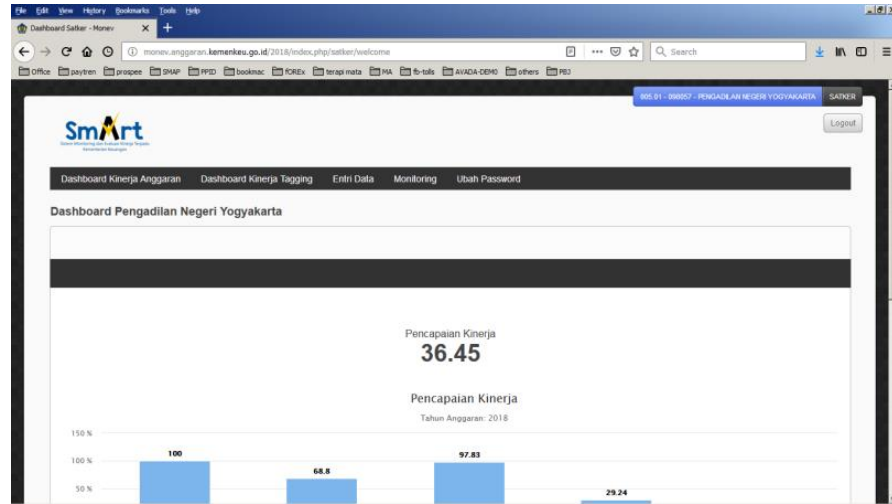
Gambar 4. 9 Tampilan Web Aplikasi SIKEP bagi semua Peradilan



f. Aplikasi Monev SMART

Sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran.

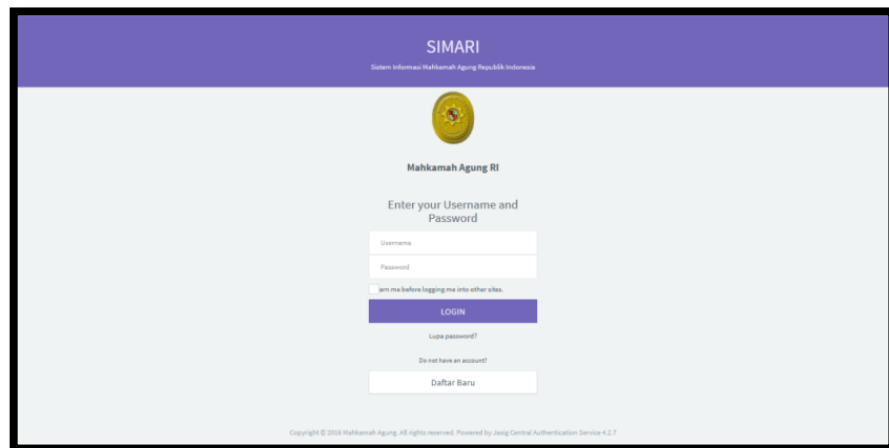
Gambar 4. 10 Tampilan Web Aplikasi Monev SMART bagi semua Peradilan



g. Aplikasi SIMARI

System Informasi Mahkamah Agung RI yang terintegrasi, baik dari system informasi perkara, system informasi keuangan dsb.

Gambar 4. 11 Tampilan Web Aplikasi SIMARI MA RI bagi semua Peradilan



h. Aplikasi SIMPONI

Sistem informasi penerimaan negara bukan pajak secara online.

Gambar 4. 12 Tampilan Web Aplikasi SIMPONI



i. Aplikasi OMSPAN

Aplikasi yang digunakan dalam rangka memantau transaksi dalam system perbendaharaan dan anggaran Negara (SPAN) yang menyajikan informasi sesuai kebutuhan/reporting.

Gambar 4. 13 Tampilan Web Aplikasi OMSPAN

| No | Nomor SP2D | Tanggal Selesai SP2D | Tanggal SP2D | Nilai SP2D | Nomor Invoice | Tanggal Invoice | Jenis SPM | Jenis SP2D | Deskripsi | Cek Detail Akun | Data SP2D (Pilih) |
|----|-----------------|----------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|---|-----------------|--------------------------|
| 1 | 170301701003566 | 04-01-2018 | 31-12-2017 | 0 | 001397/098057/2017 | 31-12-2017 | GTUP NBHL | LAINNYA | Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Modal Sebagai Pengesahan Atas Pertanggungjawaban TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPP No. 00139 tanggal 31-12-2017 | Cek Akun | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 170301701003565 | 04-01-2018 | 31-12-2017 | 0 | 001387/098057/2017 | 31-12-2017 | GTUP NBHL | LAINNYA | Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Sebagai Pengesahan Atas Pertanggungjawaban TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPP No. 00138 tanggal 31-12-2017 | Cek Akun | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 170301701003564 | 04-01-2018 | 31-12-2017 | 0 | 001377/098057/2017 | 31-12-2017 | GTUP NBHL | LAINNYA | Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Sebagai Pengesahan Atas Pertanggungjawaban TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPP No. 00137 Tanggal 31-12-2017 | Cek Akun | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 170301701003567 | 04-01-2018 | 31-12-2017 | 0 | 001407/098057/2017 | 31-12-2017 | GTUP NBHL | LAINNYA | Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Sebagai Pengesahan Atas Pertanggungjawaban TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPP No. 00140 tanggal 31-12-2017 | Cek Akun | <input type="checkbox"/> |

j. Aplikasi MONEV BAPPENAS PP. 39

Aplikasi e-Monev Bappenas merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat pelaporan data realisasi hasil pemantauan yang berjenjang dengan satuan kerja (Satker) sebagai ujung tombak penyedia data realisasi. Level KL/Biro Perencanaan, UKE-I, dan UKE-II dapat memanfaatkan data pemantauan satker di level komponen untuk menetapkan realisasi di level output serta indikator-indikator kerjanya.

Gambar 4. 14 Tampilan Web Aplikasi MONEV BAPPENAS PP. 39



k. Aplikasi SAKTI Kemenkeu

Aplikasi SAKTI atau Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi adalah aplikasi yang mengintegrasikan dari berbagai aplikasi yang telah digunakan oleh Satuan Kerja (Satker) dalam pengelolaan anggaran keuangan pemerintah. Saat ini satker menggunakan sekitar 8 (delapan) aplikasi dalam pelaksanaan anggaran. Penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut tidak jarang harus melakukan input data yang sama secara manual dan berulang-ulang. Kondisi ini tidak efektif dan menyita banyak waktu dalam melakukan pekerjaan administratif. Melalui aplikasi SAKTI, aplikasi-aplikasi tersebut akan mengakses database yang sama (*single database*) sehingga menghindari duplikasi data dan mengurangi pekerjaan administratif.

Gambar 4. 15 Tampilan Web Aplikasi SAKTI Kemenkeu



I. Formulir Digital e-Primari

e-Primari (Permohonan Izin Magang dan Riset secara elektronik) merupakan formulir digital yang digunakan untuk mengajukan permohonan izin magang dan riset di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Formulir Digital e-Primari dapat diakses melalui alamat *website* <https://bit.ly/izinmagangdanriset>. Tujuan dari e-primari adalah sebagai berikut:

- Mempermudah mahasiswa dalam mengajukan permohonan izin magang dan riset,
- Mempercepat proses permohonan izin magang dan riset,
- Mempermudah lembaga dan mahasiswa untuk mengetahui persetujuan adanya izin magang dan riset dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Gambar 4. 18 Tampilan Formulir Digital e-Primari



m. Aplikasi EMOSA

Elektronik Permohonan Sumpah Advokat merupakan Portal Layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang digunakan untuk pengajuan permohonan sumpah advokat secara online. dapat diakses melalui alamat website <https://www.emosa.pt-yogyakarta.go.id>

Gambar 4. 19 Tampilan Aplikasi EMOSA



n. Aplikasi e-Berpadu

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

Gambar 4. 20 Tampilan Aplikasi e-BERPADU



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Kegiatan ini merupakan salah satu kebijakan Mahkamah Agung yang harus dilaksanakan oleh seluruh pengadilan pada empat lingkungan peradilan, termasuk di lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja di lingkungan peradilan umum di wilayah D.I. Yogyakarta mengacu pada beberapa aturan diantaranya:

- a. Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.

Pada tahun 2019, dari lingkungan peradilan umum di wilayah D.I. Yogyakarta terdapat 3 satker yang telah meraih predikat WBK dari Kemenpan & RB yaitu Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Wates. Untuk tahun 2020, dari lingkungan peradilan umum di wilayah D.I. Yogyakarta terdapat 1 satker yang memperoleh predikat WBK yaitu Pengadilan Negeri Wonosari dan 1 satker yang memperoleh predikat WBBM yaitu Pengadilan Negeri Wates. Pada tahun 2021 terdapat satu (1) satker di wilayah D.I. Yogyakarta yang memperoleh predikat WBK yaitu Pengadilan Negeri Bantul.

Gambar 5.2 : Sertifikat Predikat WBK dan WBBM 2 Peradilan Umum di Wilayah D.I. Yogyakarta



Pada bulan Maret 2023, Tim Evaluasi Kinerja dan Penjaminan Mutu Layanan Peradilan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum telah melakukan asesmen di Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 28 Maret 2023 dan 29 Maret 2023. Dari hasil temuan yang dilakukan oleh Tim Asesmen dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melakukan perbaikan sesuai dengan laporan ketidaksesuaian evaluasi kinerja yang diberikan oleh Tim Asesmen.

Disamping itu, pada tahun 2023 Pengadilan Negeri dibawah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah mendapatkan beberapa penghargaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri Wonosari ditetapkan sebagai Peringkat I Kategori Pengadilan Negeri Kelas II pada Lomba Layanan Pengadilan/PTSP se-Indonesia.
- b. Pengadilan Negeri Bantul meraih Peringkat III (tiga) Lomba Administrasi Perkara dan Keuangan perkara Tahun 2023 untuk kategori Pengadilan Negeri Kelas IB.
- c. Anugerah Abhinaya Upangga Wisesa dan Penghargaan Peningkatan Kinerja Peradilan Umum yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Wonosari.
- d. Pengadilan Negeri Wates meraih juara 1 Lomba E-Litigasi Kategori Satuan Kerja dengan perkara 500-1000.
- e. Pengadilan Negeri Wates mendapatkan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari Badan Pengawas Mahkamah Agung RI sebagai salah satu pengadilan yang berhasil menerapkan SMAP dan mendapatkan predikat "A".

Gambar 5.1 : Pemberian penghargaan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Wates, Pengadilan Negeri Bantul, dan Pengadilan Negeri Wonosari





B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Publik di setiap Instansi terus ditingkatkan dan di permudah. Saat ini, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan jajaran Pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Melalui PTSP ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal permohonan sampai akhir/ diterbitkannya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Wujud keseriusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk:

- 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,
- 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Layanan pokok PTSP di lingkungan peradilan umum di Wilayah D.I. Yogyakarta meliputi :

- 1) permohonan informasi;
- 2) pendaftaran perkara;
- 3) pembayaran biaya;
- 4) penyerahan produk pengadilan; dan
- 5) pengajuan keluhan/pengaduan.

Sedangkan untuk layanan penunjang PTSP dilakukan oleh Penyedia Jasa Eksternal, meliputi posbakum; bank; PT Pos dan pihak lainnya yang telah mengadakan kerja sama secara resmi dengan Pengadilan.

C. Inovasi Pelayanan Publik

1. e-Primari dan emosa

e-primari (Permohonan Izin Magang dan Riset Secara Elektronik) merupakan formulir digital yang digunakan untuk mengajukan permohonan izin magang dan riset di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Emosa (elektronik permohonan sumpah advokat) merupakan permohonan elektronik yang dapat digunakan oleh organisasi advokat yang ingin mendaftarkan anggotanya untuk bisa di sumpah. E- primari dan emosa dapat diakses melalui web Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Gambar 5.5 : Tampilan e-Primari dan emosa Pada Website Pengadilan Tinggi Yogyakarta



2. Ruang Command Center

Command Center adalah sebuah ruangan khusus yang difungsikan sebagai Ruang Pusat Komando, Pembinaan, Pengawasan ataupun kegiatan lain yang dilakukan secara Daring. Tanpa harus berkunjung ke satuan kerja, Pimpinan Pengadilan Tinggi Yogyakarta bisa memantau langsung kinerja pegawai di setiap Pengadilan Negeri. Melalui tatap muka saecara online, pimpinan bisa memastikan kedisiplinan pegawai dan mengevaluasi apakah program-program yang sudah direncanakan sudah dijalankan dengan baik.

Disamping itu, masing-masing satker bisa memaparkan capaian yang telah dilakukan berikut kendala apa saja yang sedang dihadapi.

Inventarisasi masalah tersebut nantinya menjadi data primer untuk pengambilan kebijakan bagi pimpinan tingkat wilayah ke depan.

Dengan difungsikannya inovasi ini maka diharapkan tugas pokok Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terlaksana secara maksimal.

Gambar 5.6 : Ruang Command Center pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta



3. Media Center

Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Wates membuat inovasi ruangan Media Center, ruangan tersebut di peruntukan sebagai tempat media conference. Dengan ruangan Media Center akan memberikan kenyamanan dalam melakukan Konferensi Pers dengan Wartawan ataupun publik.

Gambar 5.7 : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Wates dan Sleman



4. Antrian Sidang

Antrian Sidang adalah layanan kepada Pencari Keadilan dimana Para Pihak yang berperkara akan dipanggil dan disebut nama pihak untuk memasuki ruang sidang dengan sistem yang

sudah terkoneksi dengan Aplikasi Absensi Pihak (Roll Sidang) di Meja Informasi dan Terkoneksi dengan data perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Aplikasi ini berdasarkan kedatangan dan kelengkapan para pihak, yaitu dengan cara para pihak melaporkan kedatangan ke meja informasi. Para pihak yang sudah lengkap akan disidangkan terlebih dahulu, disamping itu masyarakat dapat mengetahui persidangan suatu perkara berkaitan dengan ruang sidang, status persidangan atau sudah selesai sidang. Pemanggilan Pihak dapat dilakukan dengan menggunakan Personal Komputer, Laptop atau Handphone Android. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan adanya peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan.

Gambar 5.8 : Tampilan Inovasi Layanan Antrian Sidang di Pengadilan Negeri Yogyakarta



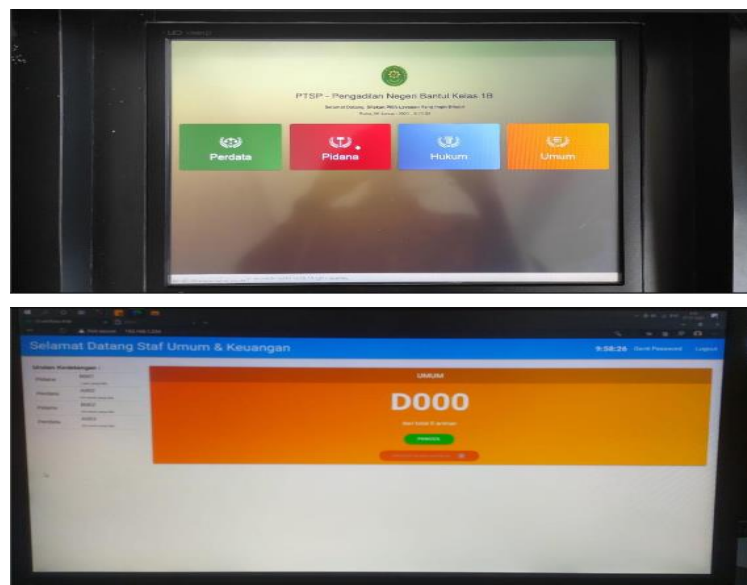
Disamping itu, di Pengadilan Negeri Bantul juga ada inovasi Locket konfirmasi dan antrian sidang yaitu sebuah locket bagi para pihak yang terjadwal bersidang di hari tersebut untuk melakukan konfirmasi/ laporan kehadiran kepada petugas. Apabila para pihak telah hadir semua, maka petugas akan lapor kepada panitera pengganti untuk disampaikan majelis hakim dan kemudian pihak-pihak dengan nomor perkara tersebut akan masuk dalam antrian sidang. Setelah majelis siap di ruang sidang, maka petugas memanggil pihak-pihak dalam perkara tersebut untuk memasuki ruang sidang menggunakan teknologi panggilan suara pada aplikasi konfirmasi dan antrian sidang tersebut.

Fasilitas ini berguna untuk memudahkan, mempercepat dan menertibkan proses persidangan baik untuk pihak yang akan bersidang maupun untuk aparat peradilan. Hal juga mendukung pengembangan Zona Integritas karena para pihak tidak akan bertemu langsung dengan panitera atau hakim secara langsung sebelum persidangan.

Manfaat sistem antrian PTSP:

- a. Bagi institusi pengadilan, antrian ini memberikan manfaat pada keteraturan dan ketertiban dalam pelayanan kepada masyarakat, juga akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.
- b. Sedangkan bagi masyarakat, adanya sistem antrian ini akan memberikan jaminan bahwa masyarakat akan terlayani sesuai dengan loket dan nomor antrian yang telah didapatkan.

Gambar 5.9 : Inovasi Loket konfirmasi dan Antrian Sidang di Pengadilan Negeri Bantul



5. Antrian PTSP

Antrian PTSP Pengadilan Negeri adalah layanan kepada pencari keadilan dimana para pihak yang berperkara akan dipanggil untuk memasuki meja PTSP dengan sistem yang sudah terkoneksi dengan mesin antrian. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan adanya

peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan di Pengadilan Negeri se Wilayah D.I. Yogyakarta.

□ **Sebelum adanya inovasi**

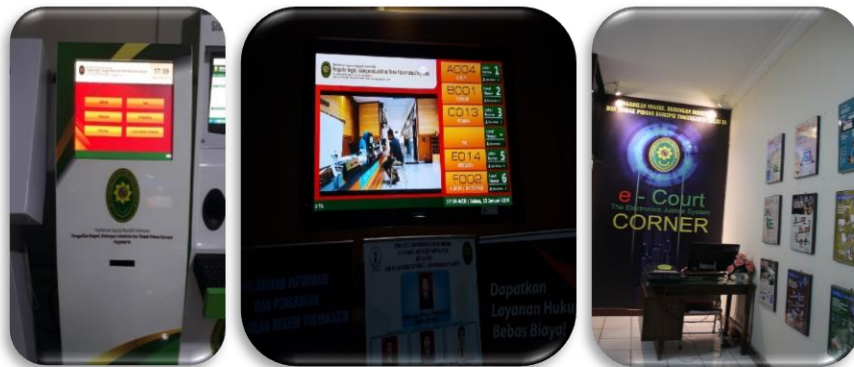
Pengunjung datang ke pengadilan langsung menuju meja PTSP, petugas tidak dapat mengetahui layanan mana yang dituju oleh pengunjung tersebut, harus bertanya lisan terlebih dahulu. Pelayanan PTSP belum tertata dengan baik & belum dapat dilakukan rekapitulasi pengunjung.

□ **Sesudah adanya inovasi**

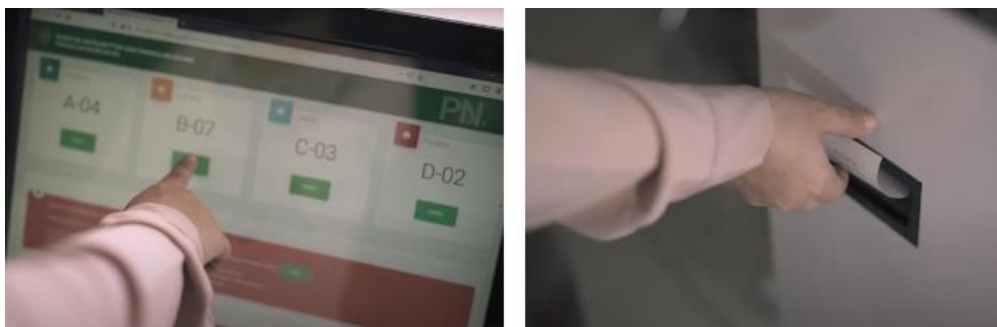
Pelayanan PTSP menjadi lebih tertata dengan baik, pengguna pengadilan mengambil nomor antrian sesuai dengan layanan yang dituju (pidana/perdata/hukum/umum) sesuai dengan keperluannya. Pada ruang tunggu disediakan layer monitor untuk menampilkan urutan antrian dan panggilan dilakukan oleh sistem dengan audio yang jelas.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan seluruh Pengadilan dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah menyediakan antrian PTSP yang sekaligus terdapat loket pojok E-court untuk membantu masyarakat mendaftarkan akun atau perkara melalui E-Court.

Gambar 5.10 : Inovasi Antrian PTSP di Pengadilan Negeri Yogyakarta



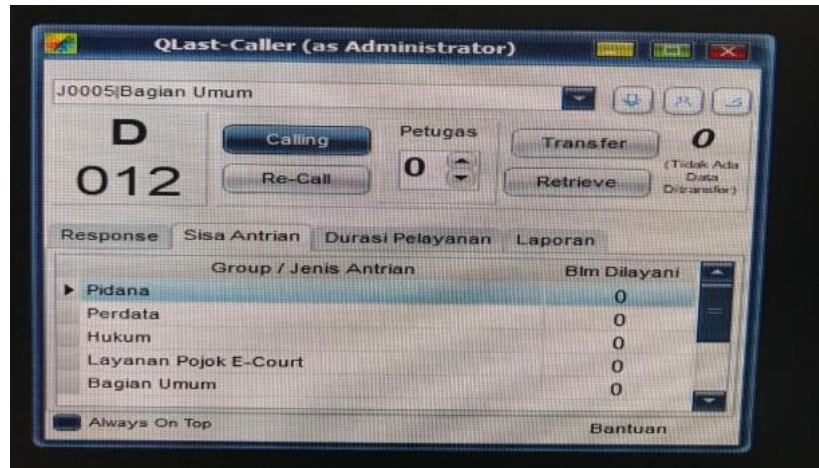
Gambar 5.11 : Inovasi Antrian PTSP di Pengadilan Negeri Wates



Gambar 5.12 : Inovasi Antrian PTSP di Pengadilan Negeri Bantul



Gambar 5.13 : Inovasi Antrian PTSP di Pengadilan Negeri Sleman



Gambar 5.14 : Inovasi Antrian PTSP di Pengadilan Negeri Wonosari



6. Co-working space

Co-working space merupakan inovasi yang ada di Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Bantul yang merupakan sebuah area/ ruang yang disediakan bagi pengunjung pengadilan yang ingin tetap dapat mengerjakan tugas lainnya sembari menunggu persidangan atau hasil layanan. Di area ini disediakan fasilitas meja kursi dan free wifi.

Gambar 5.14 : Inovasi Co-working Space di Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Bantul



Sedangkan di Pengadilan Negeri Wates, pengunjung dapat sambil bekerja ketika menunggu persidangan di Media Edukasi.

Gambar 5.15 : Inovasi Media Edukasi di Pengadilan Negeri Wates



7. Ruang Pengasuhan Anak

Ruang Pengasuhan Anak (*Playground*/ ruang edukasi anak) di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul terdapat ruang pengasuhan anak selama orang tuanya di ruang pemeriksaan/persidangan.

Gambar 5.16 : Ruang Pengasuhan Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul



Selain itu, di Pengadilan Negeri Sleman juga sudah meluncurkan inovasi Tempat Pengasuhan Anak, dan Pengadilan Negeri Wates anak-anak yang ikut orang tua datang ke Pengadilan dapat menunggu sambil bermain di Tempat Pengasuhan Anak.

Gambar 5.17 : Ruang Edukasi Anak di Pengadilan Negeri Wates dan Sleman



8. Ruang Menyusui

Ruang menyusui bagi para pencari keadilan / pengunjung di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Wates

Gambar 5.18 : Ruang Menyusui di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Wates dan Sleman



9. Pojok Baca

Pojok baca merupakan Inovasi dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, diharapkan dapat mengeliminasi rasa jenuh masyarakat saat menunggu dengan menyediakan bahan pustaka yang ringan,

rekreatif dan menghibur, maupun bahan pustaka yang dapat menjadi sumber inspirasi dan semangat bagi pembacanya. Layanan Pojok Baca ini bekerja sama dengan BPAD DIY. Masing-masing pojok baca akan dilengkapi 100 eksemplar buku yang setiap dua bulan sekali akan diganti. Buku-buku yang disediakan meliputi berbagai subjek seperti kesehatan, pengetahuan umum populer, buku-buku praktis, keagamaan serta fiksi.

Sedangkan di Pengadilan Negeri Wates ada inovasi Pojok Edukasi, dimana pengunjung pengadilan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan membaca buku yang sudah disediakan oleh pengadilan sambil menunggu layanan di pojok edukasi.

Gambar 5.19 : Inovasi Pojok Baca dan Media Edukasi di PN Yogyakarta, PN Wates, dan PN Bantul



10. E-tilang

Adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh masyarakat pelanggar lalu lintas untuk mengetahui besaran denda yang harus dibayar tanpa harus datang ke kantor pengadilan. Aplikasi ini dapat diakses pada website Pengadilan Negeri Bantul. Cara kerja aplikasi ini adalah cukup dengan memasukkan nomor seri surat tilang, maka akan muncul informasi nama pelanggar, barang bukti dan besaran denda yang harus dibayar.

Manfaat yang diperoleh dari adanya e-tilang:

- a. Masyarakat tidak perlu datang dan berkerumun di Pengadilan Negeri Bantul untuk mengetahui jumlah denda tilang yang harus dibayar;
- b. Mudah, cepat dan murah karena hanya memanfaatkan teknologi informasi dengan mengakses website pengadilan untuk mengetahui denda;
- c. Efisien dan efektif segera mendapatkan informasi yang akurat

Gambar 5.20 : Inovasi Aplikasi E-tilang di Pengadilan Negeri Bantul



11. Syarat Layanan

Merupakan aplikasi informasi tentang syarat-syarat atas layanan yang ada di pengadilan. Bagi masyarakat yang belum mengetahui syarat apa saja yang harus diserahkan untuk mendapatkan suatu layanan dapat menggunakan aplikasi ini secara mandiri. Aplikasi ini

disediakan di portal aplikasi komputer kiosk layar sentuh di bagian depan/ pintu masuk kantor pengadilan.

Manfaat inovasi:

- a. Masyarakat tidak perlu mengantri di meja petugas PTSP hanya untuk mengetahui syarat apa saja yang harus disiapkan untuk mendapatkan layanan peradilan.
- b. Mudah dan cepat karena tersedia di kios-k layar sentuh di pintu masuk pengadilan dan dioperasikan secara mandiri.



Gambar 5.21 : Inovasi Syarat layanan di Pengadilan Negeri Bantul

12. Warung Kejujuran

Warung kejujuran tersebut dikonsept untuk seluruh pengunjung maupun pegawai pengadilan. Pembeli mengambil barang, membayar dan mengambil pengembalian sendiri di kotak yang telah disediakan. Keuntungan dari hasil penjualan akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan teman-teman honorer.

Gambar 5.22 : Inovasi Warung kejujuran di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Sleman



Di Pengadilan Negeri Wates juga memiliki inovasi Warung kejujuran yaitu Media Edukasi berupa kantin kejujuran, pengunjung bisa ambil bayar (ambyar) makan dan minuman secara mandiri untuk melatih kejujuran.

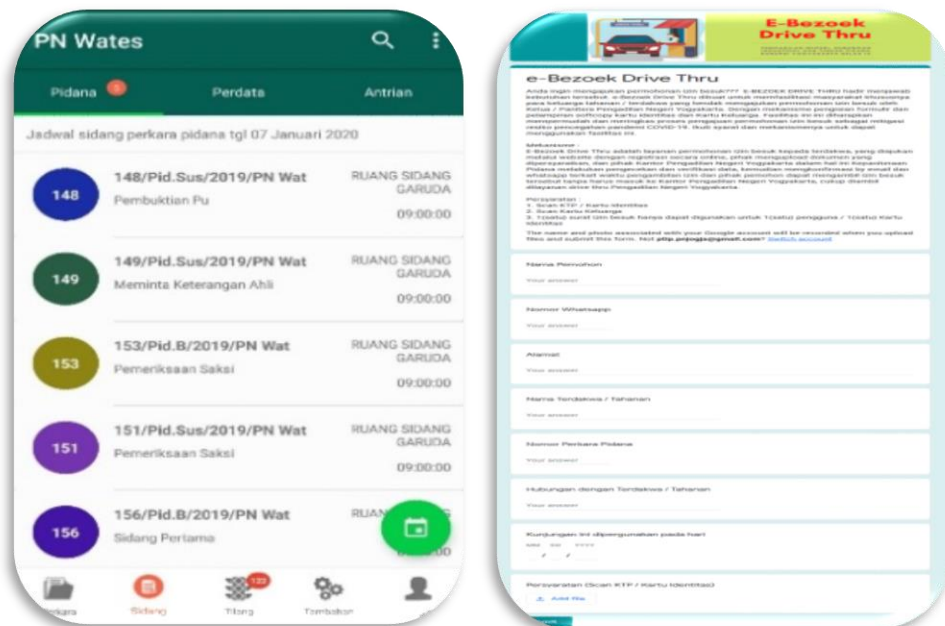
Gambar 5.23 : Inovasi Media Edukasi Kantin Kejujuran di Pengadilan Negeri Wates



13. Mext SIPP

Mext SIPP memudahkan masyarakat untuk mengetahui jadwal sidang dan denda tilang di Pengadilan Negeri Wates melalui handphone yang berbasis android dengan mengunduh aplikasi melalui playstore

Gambar 5.24 : Inovasi Mext SIPP di Pengadilan Negeri Wates



Jadwal sidang

Cek denda tilang

14. AVATAR (Asisten Virtual), Web Chat , Sivina, dan Bima

AVATAR (Asisten Virtual Pengadilan Negeri Wates Juara) dan Web Chat di Pengadilan Negeri Wates, Sivina di Pengadilan Negeri Wonosari, dan Bima di Pengadilan Negeri Bantul Sebelum adanya inovasi, untuk mendapatkan informasi dan layanan terkait pengadilan, masyarakat harus datang ke kantor pengadilan. Sesudah adanya inovasi, untuk mendapatkan informasi dan layanan terkait pengadilan, informasi perkara, biaya perkara, jadwal persidangan, tilang, statistik, anggaran, kinerja pengadilan dan informasi yang lain masyarakat tidak perlu datang ke kantor pengadilan, cukup bertanya dengan Whatsapp dan memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi seputar pelayanan di Pengadilan Negeri Wates (AVATAR) dan Pengadilan Negeri Wonosari (Sivina) serta Pengadilan Negeri Bantul (BIMA) dengan cara chat langsung melalui aplikasi whatsapp, atau scan barcode yang nantinya langsung terhubung ke akun AVATAR ataupun SIVINA dan BIMA Akan melayani selama 24 jam, 7 hari kerja dan bebas biaya.

Gambar 5.25 : Inovasi Avatar dan Web Chat (PN Wates), SIVINA (PN Wonosari), dan Bima (PN Bantul)



15. Pelayanan Ramah Difabel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, fasilitas tersebut ditujukan untuk lebih menjamin

kehormatan, kemajuan perlindungan, pemberdayaan, penegakan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : W13-U/252/SK/KPT/XI/2020 tanggal 05 November 2020 tentang Penerapan Pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas Khususnya Tuna Netra dan Tuna Rungu yang berhadapan dengan Hukum pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Kebijakan tersebut bertujuan agar Pengadilan Negeri se- wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas dan agar memiliki tingkat aksesibilitas yang seragam dalam melayani peyandang disabilitas.

Kelima pengadilan yang dimaksud antara lain Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Wonosari, dan Pengadilan Negeri Wates. Fasilitas tersebut antara lain guiding block, ramp, handrail, dokumen braille, toilet, hingga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Adapun fasilitas yang disediakan di Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta adalah :

- a. Kursi Roda
- b. Tongkat Kruk
- c. Kursi tunggu prioritas untuk penyandang disabilitas
- d. Toilet untuk penyandang disabilitas
- e. Jalur Difable
- f. Parkir difable

Gambar 5.27 : Beberapa Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas Di PT Yogyakarta dan PN Yogyakarta



Pelayanan Ramah Difabel PN Wonosari, masyarakat pencari keadilan dengan kebutuhan khusus tuna netra lebih mudah ketika memasuki gedung pengadilan, dengan disediakan guiding block dari jalan raya ke gedung pengadilan. Tersedia leaflet informasi perkara dan layanan pengadilan dengan huruf Braille bagi tuna netra. Tersedia toilet khusus difabel, yang memungkinkan penyandang disabilitas dapat buang air kecil atau besar dengan nyaman. Tersedia video layanan pengadilan yang disajikan dengan bahasa isyarat untuk tuna rungu dan pengadilan menyediakan alat bantu jalan seperti kursi roda dan kruk, serta alat bantu pendengaran.

Di Pengadilan Negeri Wates, Pengunjung Disabilitas lebih mudah lagi menjangkau Pengadilan Negeri Wates karena terdapat Guiding Block, mereka juga dipermudah dengan sarana meminta bantuan yang lebih cepat dan efisien ketika di kamar mandi difabel terkunci atau terjadi sesuatu di ruang sidang serta bagi pengunjung berkebutuhan khusus dapat langsung terlayani tidak memerlukan antrian panjang.

Gambar 5.28 : Beberapa Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Wates



Gambar 5.29 : Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Sleman



16. Layanan air minum gratis

Disediakan untuk para pengunjung yang menunggu antrian sidang atau antrian layanan di Pengadilan Negeri Bantul disediakan air minum secara gratis lengkap dengan air panas dan gula, teh, kopi.

Gambar 5.30 : Layanan Air minum gratis di Pengadilan Negeri Bantul

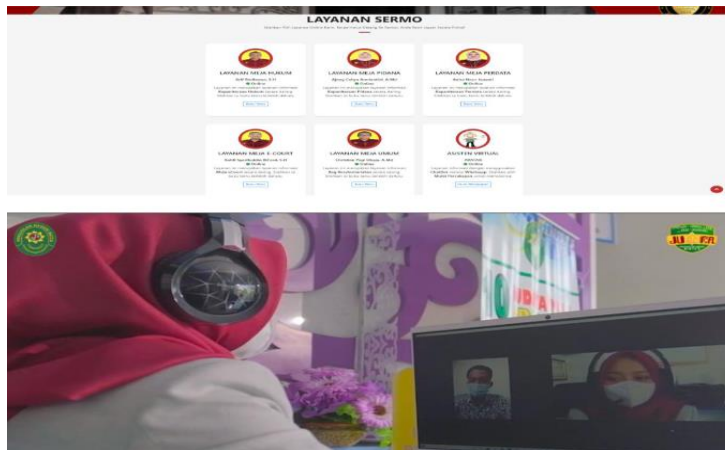


17. SERMO (Servis Meja PTSP Online)

Kendala Yang Dihadapi Dan Cara Penyelesaiannya

- a. SERMO (Service Meja PTSP Online) belum berfungsi secara maksimal dikarenakan masyarakat jarang menggunakannya, sehingga memaksimalkan media komunikasi yang lain seperti Whatsapp, Instagram dan Facebook.
- b. Kendala dari aplikasi-aplikasi yang berbasis android yaitu bagi pengunjung yang tidak memiliki handphone berbasis android, cara penyelesaiannya adalah dengan cara petugas PTSP akan menjelaskan saat pengunjung datang ke pengadilan tentang informasi yang dibutuhkan.

Gambar 5.31 : Layanan SERMO (Servis Meja PTSP Online) di Pengadilan Negeri Wates



18. Mediator Desa

Pada tahun 2023, Pengadilan Wonosari meluncurkan inovasi “Mediator Desa”. Peran Pengadilan Negeri Wonosari untuk masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan secara rutin ialah program mediator desa. Dengan kerjasama dengan Kantor Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik, Pengadilan Negeri Wonosari selalu dilibatkan menjadi narasumber kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Dalam kesempatan bertemu dengan warga inilah, Pengadilan Negeri Wonosari memberikan edukasi dan pemahaman antara lain tentang teknik

mediasi, tentang hukum dan peradilan, serta menyampaikan inovasi-inovasi layanan, termasuk adanya program prodeo.

Inovasi ini dilengkapi buku panduan mediator desa. Lomba inovasi Badilum tahun 2023 menempatkan inovasi Mediator Desa Pengadilan Negeri Wonosari sebagai juara III yang diberikan dalam acara penghargaan Abinaya Upangga Wisesa oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 11 Desember 2023 di Jember.

Gambar 5.31 : Edukasi Mediator Desa Kepada Kepala / Aparatur Desa



19. UMK Cerdas Hukum

Pengadilan Negeri Wonosari pada pertengahan tahun 2023 ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk menjadi salah satu pilot project pengadilan negeri pemberi layanan untuk pelaku UMKM di Kabupaten Gunungkidul, termasuk layanan pembebasan perkara (prodeo) dan layanan pos bantuan hukum untuk perkara yang dihadapi UMKM.

Gambar 5.32 : Sosialisasi Inovasi UMK Cerdas Hukum



20. NGOBRAS DAN SIWALANG (Siaran Wawasan Layanan Pengadilan)

NGOBRAS (Ngobrol Asik) merupakan inovasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yaitu *Podcast* seputar hukum yang ditampilkan pada chanel youtube Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Podcast yang dilakukan adalah Tanya jawab seputar pertanyaan hukum yang dipandu oleh host dari ASN Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan diisi oleh narasumber dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Selain itu, Pengadilan Wonosari juga melakukan peningkatan Pelayanan publik. Informasi layanan dan sistem pengadilan diinformasikan melalui inovasi SIWALANG. Siaran dilakukan secara rutin setiap hari Kamis minggu keempat setiap bulan. Sampai dengan bulan Desember 2023, telah dilakukan 7 edisi siaran radio bekerjasama dengan Radio Dhaksinarga Gunungkidul Dinas Kominfo Pemkab Gunungkidul.

Gambar 5.33 : NGOBRAS dan SIWALANG



D. Kegiatan Pelayanan Lainnya

1. Pelaksanaan SAKIP

Seiring dengan tujuan manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*), diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah menyusun komponen-komponen SAKIP antara lain :

1. Rencana Strategis (Renstra).
2. Indikator Kinerja Utama (IKU).
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
4. Perjanjian Kinerja (PKT).
5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
6. Program Kerja (PK).

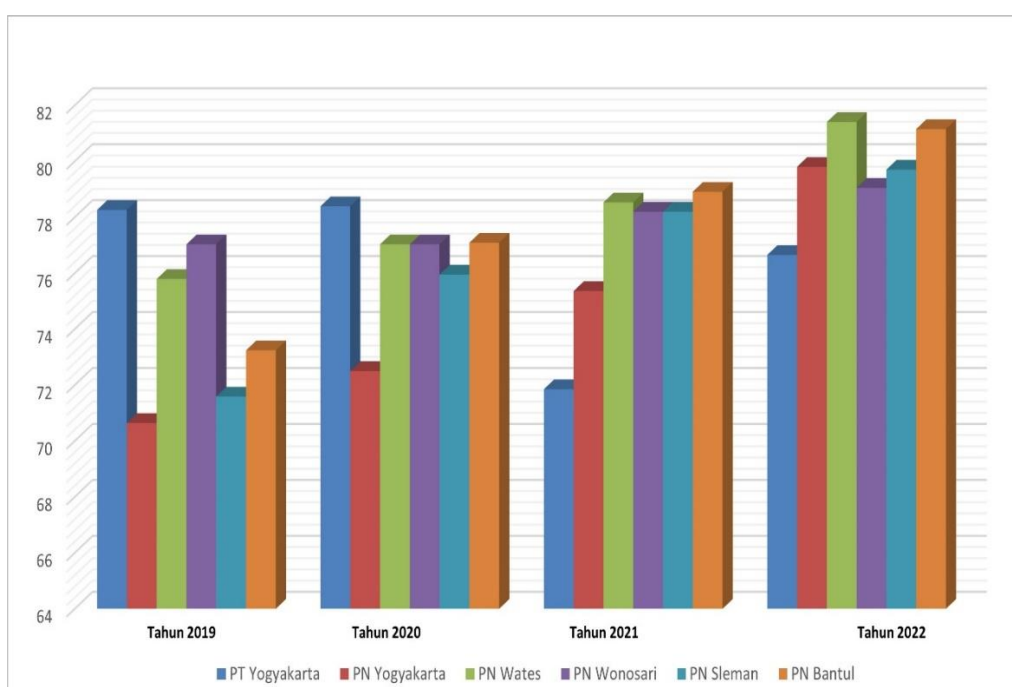
Berikut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021-2022 Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yaitu:

Tabel 5.1 : Hasil Penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019-2022

| No | Satuan Kerja | LKjIP 2019 | | LKjIP 2020 | | LKjIP 2021 | | LKjIP 2022 | |
|----|---------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | | Score | Nilai | Score | Score | Score | Nilai | Score | Nilai |
| 1 | PT Yogyakarta | 78,26 | BB | 78,39 | BB | 71,85 | BB | 76,65 | BB |
| 2 | PN Yogyakarta | 70,64 | BB | 72,5 | BB | 75,36 | BB | 79,8 | BB |
| 3 | PN Wates | 75,79 | BB | 77,03 | BB | 78,53 | BB | 81,4 | A |
| 4 | PN Wonosari | 77,03 | BB | 77,03 | BB | 78,2 | BB | 79,05 | BB |
| 5 | PN Sleman | 71,59 | BB | 75,95 | BB | 78,2 | BB | 79,7 | BB |
| 6 | PN Bantul | 73,24 | BB | 77,09 | BB | 78,91 | BB | 81,15 | A |

Berdasarkan data diatas, nilai LKJIP pada Peardilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta yang mengalami kenaikan dalam dua tahun terakhir adalah Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dan seluruh Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yaitu: Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Wates dan Pengadilan Negeri Wonosari, sedangkan peningkatannya dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 5.1 : Peningkatan Nilai LKjIP pada Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta Periode 2019-2022



2. Pelaporan LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

LHKPN memiliki dasar hukum sehingga setiap penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPNnya. Pertama adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dasar hukum lainnya adalah Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara.

Atas dasar hukum-dasar hukum tersebut, setiap Penyelenggara Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib untuk bersedia diperiksa kekayaannya, baik sebelum menjabat, selama menjabat atau bahkan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, pensiun dan juga wajib dalam menginformasikan harta kekayaan.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai lembaga yudikatif memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan LHKPN. Para Pejabat Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memiliki kewajiban untuk melaporkan LHKPN berjumlah 82 orang, sedang pejabat yang sudah melaporkan harta kekayaannya melalui laporan LHKPN sebanyak 85 orang yaitu :

| | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ketua | : 1 orang |
| 2. Wakil Ketua | : 1 orang |
| 3. Hakim Tinggi | : 35 orang |
| 4. Hakim Yustisial | : 8 orang |
| 5. Hakim Ad Hoc Tipikor | : 3 orang |
| 6. Panitera | : 1 orang |
| 7. Sekretaris | : - orang |
| 8. Panitera Muda | : 4 orang |
| 9. Kepala Bagian | : 2 orang |
| 10. Panitera Pengganti | : 26 orang |
| 11. Pranata keuangan | : 2 orang |
| JUMLAH | : 82 orang |

BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

1. Pengawasan Bidang

Hakim Tinggi Pengawas Bidang telah melaksanakan pengawasan ke masing-masing bidang dan telah membuat laporan hasil pengawasan dimaksud secara rutin setiap bulan. Hasil pengawasan telah dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku koordinator pengawasan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Sebagai dasar pelaksanaan pengawasan bidang adalah :

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan Peradilan;
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: W13-U/185/SK/KPT/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Bidang, Humas dan Protokol pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 143/KPT.W13-U/SK.KP3.4.2/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : W13-U/19/SK/KPT/II/2023 tanggal 10 Januari 2023 Perihal Tim Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Tim Satgas SIPP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

2. Pengawasan Reguler

Pengadilan Tingkat Banding selaku *Voorpost* Mahkamah Agung RI harus dapat memastikan implementasi fungsi pengawasan dan pembinaan sebagai atasan langsung terhadap bawahannya sebagaimana termuat dalam Paket Kebijakan tentang Pengawasan dan Pembinaan dalam PERMA Nomor 7,8 dan 9 Tahun 2016. Pada tahun 2023, Pemeriksaan dan Pengawasan ke Pengadilan Tingkat Pertama telah dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan Pemeriksa Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 143/KPT.W13-U/SK.KP3.4.2/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Selanjutnya untuk menindaklanjuti surat keputusan tersebut, Pemeriksaan dan Pengawasan ke Pengadilan Tingkat Pertama telah dilaksanakan ke lima Pengadilan Negeri di Wilayah D.I. Yogyakarta, yaitu:

| No. | Pengadilan | Semester 1 | Semester 2 |
|-----|------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Pengadilan Negeri Yogyakarta | 22 s/d 23 Mei 2023 | 23 s/d 24 Oktober 2023 |
| 2. | Pengadilan Negeri Sleman | 24 s/d 25 Mei 2023 | 25 s/d 26 Oktober 2023 |
| 3. | Pengadilan Negeri Wates | 24 s/d 25 Mei 2023 | 26 s/d 27 Oktober 2023 |
| 4. | Pengadilan Negeri Wonosari | 22 s/d 23 Mei 2023 | 30 s/d 31 Oktober 2023 |
| 5. | Pengadilan Negeri Bantul | 22 s/d 23 Mei 2023 | 24 s/d 25 Oktober 2023 |

Selain itu, kegiatan pembinaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se-wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2023.

B. Evaluasi

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum D.I. Yogyakarta mengadakan rapat berjenjang untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi tiap bagian agar semua tugas dan fungsi masing-masing bagian berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi yang sama.

Rapat berjenjang dimulai dari :

- 1) Rapat tiap panmud/subbagian;
- 2) Rapat tiap panmud/subbagian bersama hakim pengawas bidang;
- 3) Rapat kepaniteraan/kesekretariatan;
- 4) Rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh pegawai.

Rapat berjenjang ini masing-masing dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan sekali. Rapat berjenjang merupakan bagian dalam sistem akreditasi penjaminan mutu yang mensyaratkan untuk setiap satker pada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya untuk melaksanakan sistem tersebut, yang nantinya hasil rapat berjenjang tersebut akan dibahas ke dalam rapat rutin bulanan/*briefing*.

Rapat rutin bulanan/*briefing* membahas berbagai persoalan serta mengevaluasi hasil temuan dari Hakim Pengawas Bidang, permasalahan di tingkat kepaniteraan/kesekretariatan, dan lain-lain. Rapat ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur dalam menghadapi rapat bulanan yang dilaksanakan pada bulan berjalan. Hasil evaluasi tersebut, kemudian dilakukan perbaikan secara komprehensif dan menyeluruh oleh masing-masing bidang. Temuan-temuan atau ketidaksesuaian dari hasil pengawasan regular oleh Tim Pengawas dan Pemeriksa Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sudah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan dilakukan evaluasi oleh Tim Pengawas dan Pemeriksa Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 sebagaimana disampaikan di depan dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Penyelesaian perkara di tingkat banding maupun tingkat pertama telah dilaksanakan secara optimal dengan didukung aplikasi SIPP, E-Berpadu dan E-Court untuk pelaksanaan pengelolaan perkara, aplikasi MIS dan EIS untuk monitoring dan evaluasi.
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dilaksanakan dengan baik dengan didukung teknologi informasi, kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bagi hakim dan pegawai masih diperlukan, agar dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan prima.
3. Realisasi DIPA seluruh satker di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta cukup tinggi mencapai angka 97% - 99,89%, dengan didukung sarana dan prasarana serta Teknologi Informasi yang memadahi tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kekurangan anggaran operasional dan sarana/prasarana pendukung.
4. Pelayanan publik telah dilaksanakan dengan inovasi-inovasi yang telah dikembangkan dan diterapkan pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan seluruh Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta, masing-masing pengadilan sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
5. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepaniteraan Muda dan sub Bagian pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta telah diawasi secara rutin oleh Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas Daerah yang telah ditetapkan Tim Pengawas dengan Surat Keputusan yang berlaku oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

B. Rekomendasi

Kedepan agar dapat meningkatkan kinerja kami merekomendasikan :

1. Aplikasi pengelolaan perkara dan aplikasi monitoring dan evaluasi agar selalu diupdate menyesuaikan perkembangan Teknologi Informasi dan kebijakan terbaru.
2. Kebutuhan diklat untuk meningkatkan kompetensi bagi hakim/ASN agar dapat dipenuhi oleh Mahkamah Agung RI, koordinasi internal antara pengelola kepegawaian dan pengelola keuangan dalam pelaksanaan mutasi Hakim/ASN untuk dapat ditingkatkan agar meminimalisir pagu minus belanja pegawai.
3. Kekurangan anggaran operasional dan sarana/prasarana serta teknologi informasi pada satker agar dapat dipenuhi untuk menunjang peningkatan kinerja dan pelayanan prima
4. Perlu dianggarkan pemeliharaan asset tak berwujud (aplikasi) dan asset tetap guna meningkatkan pelayanan publik.
5. Perlu disusun petunjuk teknis baku pengawasan seluruh satker Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se wilayah D.I Yogyakarta untuk keseragaman laporan dan peningkatan kualitas pengawasan.

LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 7/KPT.W13-U/SK.KU1.1.1/I/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2024



KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NOMOR: 7 /KPT.W13-U/SK.KU1.1.1/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tatanan organisasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *accountability*, maka setiap institusi harus menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk melaporkan perkembangan dan pencapaian serta prestasi yang telah diraih oleh organisasi selama tahun 2023;
 - b. Bahwa data dan informasi yang akurat menjadi kunci keberhasilan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik guna terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan efektif;
 - c. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Laporan Tahunan) pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2023, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan;
 - d. Bahwa yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 perubahan ke 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4108/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2023 mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan, menginventarisir dan mengolah data pendukung yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan;

2. Menyusun buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2023 sesuai dengan outline yang ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik dan memperbanyak sesuai kebutuhan;

3. Melaporkan hasil penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

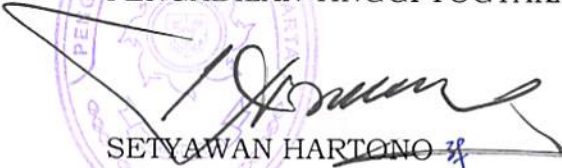
4. Mengirimkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ke Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dalam bentuk softcopy melalui link [https://bit.ly/Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023](https://bit.ly/Laporan_Pelaksanaan_Kegiatan_Tahun_2023) pada minggu pertama pada bulan Februari 2024;

KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2023 dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 3 Januari 2024

KETUA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA



SETYAWAN HARTONO

Tembusan disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi;
5. Kepala Badan Pengawasan;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
 NOMOR : 7 /KPT.W13-U/SK.KU1.1.1/I/2024
 TANGGAL : 3 Januari 2024

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2023

| NO | N A M A | JABATAN DINAS | JABATAN / BAGIAN DALAM TIM | TUGAS |
|----|---|--|------------------------------|--|
| 1. | Setyawan Hartono, S.H., M.H. | Ketua | Penanggung Jawab | a. Membentuk Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023. b. Mengarahkan dan membina Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023; c. Mensosialisasikan langkah-langkah penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan sesuai outline yang ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI; d. Mengawasi pelaksanaan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2023. |
| 2. | Eddy Risdianto, S.H.,M.H. | Hakim Tinggi | Ketua Tim | a. Mengkoordinir dan memberi petunjuk kepada anggota tim tentang penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan; b. Menerima hasil pengumpulan dan pengolahan data yang telah berbentuk Laporan dari Sekretaris Tim; c. Melaporkan progress dan hasil penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada Penanggung jawab. |
| 3. | Zulfahmi Anwar S.H., M.H. Rosyidatus Syarifeini, S.Psi. | Panitera Kabag Perencanaan dan Kepegawaian | Sekretaris 1 Sekretaris 2 | a. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Ketua Tim tentang penyusunan Laporan pelaksanaan Kegiatan; b. Mengumpulkan data yang telah dituangkan dalam bentuk narasi dari semua tim untuk disusun menjadi |

| NO | N A M A | JABATAN DINAS | JABATAN / BAGIAN DALAM TIM | TUGAS |
|----|--|--|---|---|
| | | | | <p>laporan;</p> <p>c. Melaporkan progress dan hasil penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada Ketua Tim.</p> |
| 4. | <p>Suparlan, S.H.</p> <p>Mega Annisa, S.Kom.</p> | <p>Kabag Umum dan Keuangan</p> <p>Penata Layanan Operasional</p> | <p>Koordinator Tim 1</p> <p>Anggota</p> | <p>Penyusunan Narasi Halaman Muka dan Bab I</p> <p>a. Koordinator Tim mengkoordinir Anggota dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan serta membuat narasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan sesuai outline pada bagian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Halaman Kegiatan - Profil Pimpinan - Kata Pengantar dan - Bab I Pendahuluan <p>b. Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan narasi laporan kepada Sekretaris Tim.</p> |
| 5. | <p>Didit Mahatmanta, SH.</p> <p>Siti Ria Rukmana, A.Md</p> | <p>Panitera Muda Tipikor</p> <p>Pengelola Penanganan Perkara</p> | <p>Koordinator Tim 2</p> <p>Anggota</p> | <p>Penyusunan Narasi Keadaan Perkara di Peradilan Umum</p> <p>a. Koordinator Tim mengkoordinir Anggota dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan serta membuat narasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan sesuai outline yaitu pada :</p> <p>Bab II A Keadaan Perkara di Peradilan Umum (Perkara Perdata, Pidana, dan Tipikor)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keadaan Perkara Tingkat Pertama - Keadaan Perkara Tingkat Banding - Keadaan Perkara Tingkat Kasasi - Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali |

| NO | N A M A | JABATAN DINAS | JABATAN / BAGIAN DALAM TIM | TUGAS |
|----|---|---|---|--|
| | | | | b. Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan narasi laporan kepada Sekretaris Tim. |
| 6. | Suhardi, S.H. Alfiansyah Azhar, S.H. | Panitera Pengganti Analisis Perkara Peradilan | Koordinator Tim 3 Anggota | <p>Penyusunan Narasi Penyelesaian Perkara Peradilan Umum</p> <p>a. Koordinator Tim mengkoordinir Anggota dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan serta membuat narasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan sesuai outline yaitu pada : Bab II B Penyelesaian Perkara di Peradilan Umum (Perkara Perdata, Pidana, dan Tipikor) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sisa perkara yang diputus - Jumlah perkara yang diputus tepat waktu - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK - Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi - Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi <p>b. Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan narasi laporan kepada Sekretaris Tim.</p> |
| 7. | Sumarmin, S.H., M.H. Danu Arman, S.H., M.H. Merina Kusumawati, SH., M.H. | Panitera Muda Perdata Analisis Perkara Peradilan Analisis Perkara Peradilan | Koordinator Tim 4 Anggota Anggota | <p>Penyusunan Narasi Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) / Layanan Hukum:</p> <p>a. Koordinator Tim mengkoordinir Anggota dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan serta membuat narasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan sesuai outline yaitu pada: Bab II C Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO</p> |

| NO | N A M A | JABATAN DINAS | JABATAN / BAGIAN DALAM TIM | TUGAS |
|----|---|---|----------------------------------|---|
| | | | | Pengadilan) / Layanan Hukum: - Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran) - Sidang keliling / pelayanan terpadu - Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) b. Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan narasi kepada Sekretaris Tim. |
| 8. | Nur Hasanah, SH., MBA. Deby Aryanto Syahputra, S.Psi. | Kasubag Kepegawaian dan TI Penata Layanan Operasional | Koordinator Tim 5 Anggota | Penyusunan Narasi Sumber Daya Manusia : a. Koordinator Tim mengkoordinir Anggota dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan serta membuat narasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan sesuai outline pada Bab III yaitu : Sumber Daya Manusia - Mutasi - Promosi - Pensiun - Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yg telah mengikuti Diklat) b. Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan narasi laporan kepada Sekretaris Tim. |
| 9. | Rina Widiastuti, S.E., M.B.A. Nanda Aprilia Suri, A.md.Ak. | Kasubag Keuangan dan Pelaporan Pengolah Data dan Informasi | Koordinator Tim 6 Anggota | Penyusunan Narasi Pengelolaan Keuangan : a. Koordinator Tim mengkoordinir Anggota dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan serta membuat narasi Laporan |

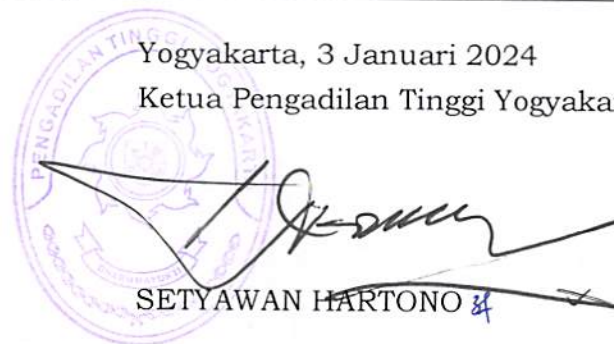
| NO | N A M A | JABATAN DINAS | JABATAN / BAGIAN DALAM TIM | TUGAS |
|-----|---|--|----------------------------------|---|
| | | | | <p>Pelaksanaan Kegiatan sesuai outline yaitu pada: Bab IV A Pengelolaan Keuangan - Laporan Realisasi Anggaran Belanja - Laporan Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNB b. Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan narasi laporan kepada Sekretaris Tim.</p> |
| 10. | Erwan Hermawan, S.Kom. Anggi Reky Hertanti, S.M. | Kasubag TU RT PPPK | Koordinator Tim 7 Anggota | <p>Penyusunan Narasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana: a. Koordinator Tim mengkoordinir Anggota dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan serta membuat narasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan sesuai outline yaitu pada : Bab IV B Pengelolaan Sarana dan Prasarana - Sarana dan Prasarana Tanah, Gedung Dan Kendaraan - Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung b. Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan narasi kepada Sekretaris Tim.</p> |
| 11. | Suramin, S.H., M.H. Mochamad Badi Romadloni A.Md. | Panitera Muda Hukum Pengelola Penanganan Perkara | Koordinator Tim 8 Anggota | <p>Penyusunan Narasi Pengelolaan Teknologi Informasi: a. Koordinator Tim mengkoordinir Anggota dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan serta membuat narasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan sesuai outline yaitu pada: Bab IV C Pengelolaan Teknologi Informasi - Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum - Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum;</p> |

| NO | N A M A | JABATAN DINAS | JABATAN / BAGIAN DALAM TIM | TUGAS |
|-----|---|--|-----------------------------------|--|
| | | | | b. Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan narasi laporan kepada Sekretaris Tim. |
| 12. | Agus Joko Purwanto, S.H., M.Kn. Alfina Sauqi Anwar, SH. | Hakim Tinggi Analisis Perkara Peradilan | Koordinator Tim 9 Anggota | Penyusunan Narasi Peningkatan Pelayanan Publik: a. Koordinator Tim mengkoordinir Anggota dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan serta membuat narasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan sesuai outline pada yaitu: Bab V Peningkatan Pelayanan Publik - Akreditasi Penjaminan Mutu - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) - Inovasi Pelayanan Publik b. Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan narasi laporan kepada Sekretaris Tim. |
| 13. | Sutanto, S.H., M.H. Tri Kusumaningrum Rahmawati, S.M. | Hakim Tinggi Penata Layanan Operasional | Koordinator Tim 10 Anggota | Penyusunan Narasi Pengawasan: a. Koordinator Tim mengkoordinir Anggota dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan serta membuat narasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan sesuai outline yaitu pada: Bab VI Pengawasan A Internal B Evaluasi b. Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan narasi laporan kepada Sekretaris Tim. |

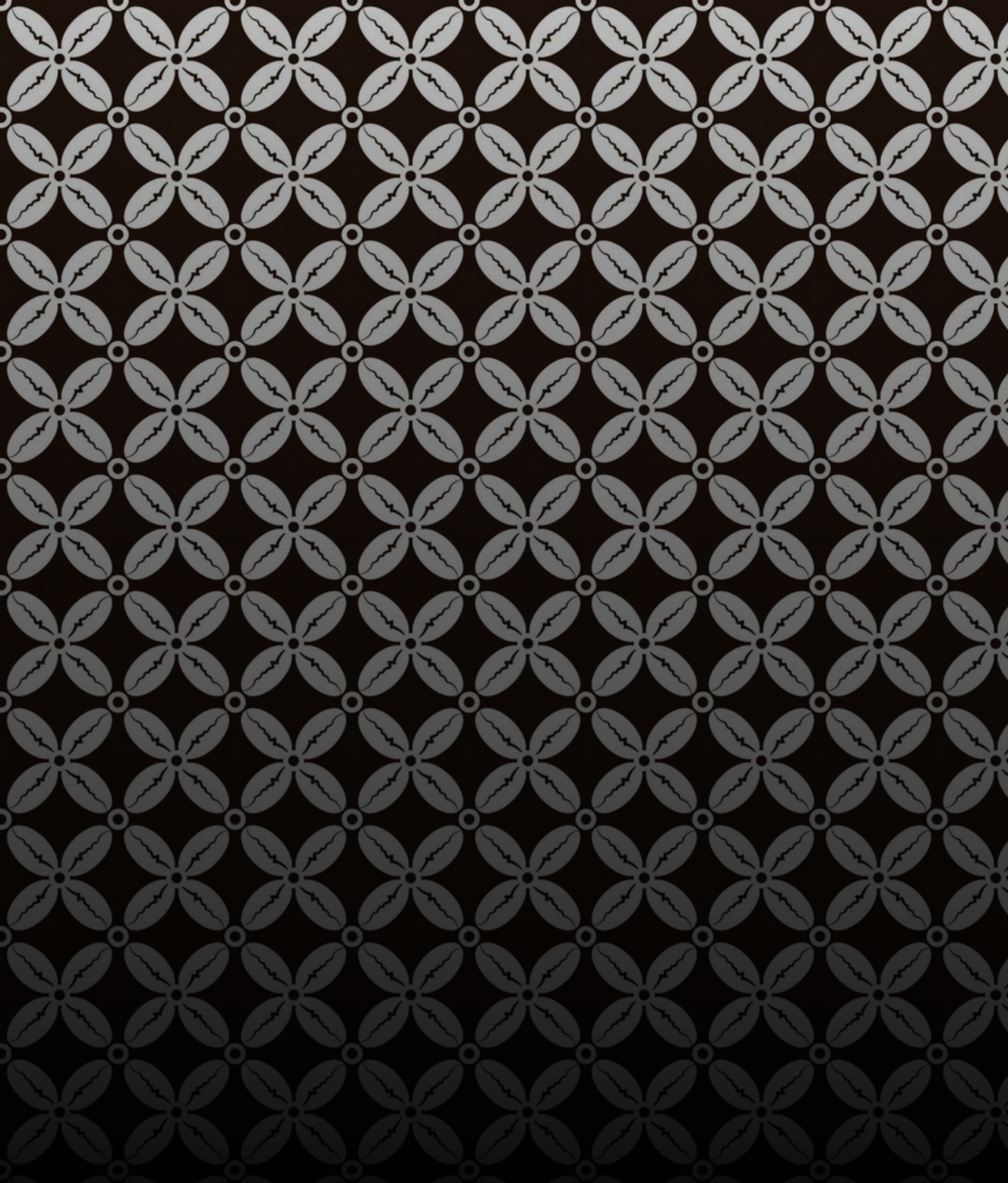
| NO | N A M A | JABATAN DINAS | JABATAN / BAGIAN DALAM TIM | TUGAS |
|-----|---|--|--|--|
| 14. | Sugito, SH. Krisna Hadi Yuda Rachmat, S.E. | Kasubag Rencana Program dan Anggaran Penata Layanan Operasional | Koordinator Tim 11 Anggota | 1. Perencanaan Laporan, Penggandaan, Distribusi dan Pengarsipan 2. Penyusunan Narasi Daftar Isi, Kesimpulan, Rekomendasi dan Daftar Pustaka 3. Menerima dan mengumpulkan data dan narasi dari Sekretaris Tim untuk dikompilasi menjadi Laporan Pelaksanaan Kegiatan. |
| 15. | Bambang Kusmunandar, S.H., M.H. Susriyani, S.H. Erwin Fajar Saputra | Hakim Tinggi PPPK PPNPN | Koordinator Tim 12 Anggota Anggota | Berkoordinasi dengan Koordinator Tim 11 untuk Pembuatan Cover, Penyuntingan dan Layout Isi Laporan Pelaksanaan Kegiatan |

Yogyakarta, 3 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



SETYAWAN HARTONO



**Jl. Prof. Dr. Wirjono
Prodjodikoro, SH.
Wojo, Bangunharjo, Sewon,
Bantul, D.I Yogyakarta**